TAHUN 2021

LAPORAN REFORMASI BIROKRASI

SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

HTTP://RB.DPR.GO.ID/

Jakarta, 2022

PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanawata'ala, penyusunan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran terhadap pelaksanaan RB tahun 2021, capaian program dan permasalahan yang dihadapi. Laporan ini juga dimaksudkan sebagai bahan acuan dan *feed back* guna mendukung pelaksanaan evaluasi internal (PMPRB) dan evaluasi eksternal.

Pelaksanaan RB di Setjen DPR RI masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar kami dapat memperbaiki dan menyempurnakan pelaksanaan RB di Setjen DPR RI pada tahun mendatang.

Semoga buku ini dapat memacu kita semua untuk melakukan terobosan-terobosan baru. Semuanya bermuara pada upaya mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, efisien dan mampu memberikan pelayanan berkualitas. Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata, kiranya kami berharap laporan ini dapat memenuhi harapan setiap pemangku kepentingan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 28 Februari 2022
Sekretaris Jenderal DPR RI,

Indra Iskandar

DAFTAR ISI

BAB I — Pendahuluan — 1
Latar Belakang • Tujuan • Sasaran

BAB II — Rencana Kerja Reformasi Birokrasi 2021 — 4

BAB III — Pelaksanaan RB 2021 — 9
Capaian Setjen DPR RI • Penghargaan *Quick Wins* • Zona Integritas • Permasalahan dan Tindak Lanjut

BAB IV — Penutup — 67
Kesimpulan • Rekomendasi

Tujuan Reformasi birokrasi *pada dasarnya untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan memiliki karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas dari KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.*

DAFTAR TABEL

BAB I

Tabel 1.1. Hasil yang Diharapkan dari Area Perubahan

BAB II

Tabel 2.1. Kegiatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tingkat mikro Setjen DPR RI
Tabel 2.2. Rencana Program Kegiatan dan Indikator Keberhasilan RB Tahun 2021

BAB III

Tabel 3.1. Delapan Area Perubahan Capaian Sasaran Reformasi Birokrasi
Tabel 3.2. Indeks Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI Tahun 2017-2021
Tabel 3.3. Capaian Rencana Aksi Manajemen Perubahan Tahun 2021
Tabel 3.4. Capaian Rencana Aksi Deregulasi Kebijakan Tahun 2021
Tabel 3.5. Capaian Rencana Aksi Penataan dan Penguatan Organisasi Tahun 2021
Tabel 3.6. Capaian Rencana Aksi Penataan Tata Laksana Tahun 2021
Tabel 3.7. Capaian Rencana Aksi Penataan Manajemen SDM Tahun 2021
Tabel 3.8. Capaian Rencana Aksi Penguatan Akuntabilitas Tahun 2021
Tabel 3.9. Capaian Rencana Aksi Penguatan Pengawasan Tahun 2021
Tabel 3.10. Capaian Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2021
Tabel 3.11. Rencana Aksi dan Capaian Quick Wins SIMFONI Tahun 2021
Tabel 3.12. Rencana Aksi dan Capaian Quick Wins RIA dan CBA Tahun 2021
Tabel 3.13. Capaian Nilai Pembangunan Zona Integritas Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021
Tabel 3.14. Capaian Nilai Pembangunan Zona Integritas Biro Kerjasama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional ahun 2021
Tabel 3.15. Capaian Nilai Pembangunan Zona Integritas Biro Persidangan II Tahun 2021
Tabel 3.16. Capaian Nilai Pembangunan Zona Integritas Pusat Kajian Anggaran Tahun 2021

DAFTAR GAMBAR

BAB III

Gambar 3.1. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi RB
Gambar 3.2. (a) Video Agen Perubahan 2021 http://rb.dpr.go.id/setjen/video-detail/id/75 (b) Pelatihan Agen Perubahan (c) *FGD* Agen Perubahan (d) *Cover* buku saku integritas
Gambar 3.3. (a) aplikasi e-legalitas (b) aplikasi JDIH
Gambar 3.4. Peta Proses Bisnis
Gambar 3.5. (a) Laporan Hasil Evaluasi Indeks SPBE 2021 (b) Sistem *Paperless Office*
Gambar 3.6. (a) penandatanganan berita acara verifikasi sistem merit (b) penerimaan anugrah meritokrasi
Gambar 3.7. (a) Penyerahan DIPA T.A. 2022 dan Penandatangan PK dan SKP tahun 2022 (b) Acara Penghargaan dalam Rapat Kerja Anggaran Setjen DPR RI
Gambar 3.8. (a) Sosialisasi dan launching Sistem Manajemen Risiko Instansi (SIMANIS) (b) Pendampingan dan verifikasi hasil penilaian mandiri atas penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi Setjen DPR RI
Gambar 3.9. (a) *E-Media* di Gedung Setjen DPR RI (b) Pemberian Penghargaan Pengelolaan arsip terbaik antar unit pengolah di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI (c) Museum KNIP *www.museum.dpr.go.id/pameranknip* (d) Penghargaan sebagai Badan Publik yang Informatif
Gambar 3.10. Fitur dalam aplikasi SIMFONI
Gambar 3.11. Pelaksanaan Bimtek ke Mitra AKD
Gambar 3.12. (a) Pelaksanaan *Quick Wins* metode RIA (*Regulatory Impact Analysis* dan CBA (*Cost and Benefit Analysis)*
Gambar 3.13. Pengumuman peraihan predikat WBK 2021 dari KemenPANRB
Gambar 3.14. (a) Penyerahan piagam penghargaan ZI atas WBK tahun 2021 Biro Persidangan II (b) Penyerahan piagam penghargaan ZI atas WBK tahun 2021
Gambar 3.15. Aplikasi SiPenjagaRB

PENGARAH REFORMASI BIROKRASI

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Dr. Ir. Indra Iskandar,	Pengarah	Sekretaris Jenderal DPR RI
2.	Dra. Damayanti, M.Si.	Pengarah	Deputi Bidang Persidangan
3.	Drs. Setyanta Nugraha, M.M., QGIA., CGCAE	Pengarah	Inspektur Utama
4.	Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.H.	Pengarah	Kepala Badan Keahlian
5.	Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si.	Pengarah	Plt. Deputi Bidang Administrasi

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.	Kepala Pusat Penelitian	Ketua Tim Kerja
2.	Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si.	Kepala Pusat Teknologi Informasi	Wakil Ketua Tim Kerja dan Koordinator Area Perubahan 4
3.	Afniwaty Tanjung, S.E., M.E.	Kepala Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi	Sekretaris Tim Kerja
4.	Dr. Dewi Barliana S., M.Psi., QIA.	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan	Koordinator Area Perubahan I dan Zona Integritas
5.	Arini Wijayanti, S.H., M.H.	Plt. Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	Koordinator Area Perubahan 2 dan Zona Integritas
6.	Dr. Aulia Sofyan, S.Sos., M.Si.	Kepala Biro Organisasi dan Perencanaan	Koordinator Area Perubahan 3
7.	Rahmad Budiaji, S.IP., M.Si.	Kepala Biro Sumber Daya Aparatur	Koordinator Area Perubahan 5
8.	Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.	Kepala Biro Keuangan	Koordinator Area Perubahan 6
9.	Dr. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn.	Inspektur II	Koordinator Area Perubahan 7
10.	Drs. Suratna, M.Si	Kepala Biro Protokol dan Humas	Koordinator Area Perubahan 8

11.	Endah Tjahjani Dwirini T., S.S., M.Phil.	Kepala Biro Kerjasama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional	Koordinator Zona Integritas
12.	Dr. Asep A. Saefulloh, S.E., M.Si.	Kepala Pusat Kajian Anggaran	Koordinator Zona Integritas
13.	Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.	Kepala Pusat Perancangan Perundang-undangan	Koordinator Zona Integritas
14.	Chairil Patria, S.IP., M.Si.	Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan	Koordinator Zona Integritas
15.	Dra. Nurul Faiziah	Plt. Kepala Biro Persidangan II	Koordinator Zona Integritas
16.	Suprihartini, S.IP., M.Si	Kepala Biro Persidangan I	Koordinator *Quick Wins*
17.	Akhmad Aulawi, S.H., M.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan	Koordinator *Quick Wins*
18.	Djustiawan Widjaya, S.Sos., M.A.P.	Kepala Biro Umum	Pelaksana
19.	Drs. Helmizar, M.E.	Kepala Pusat Akuntabilitas Keuangan Negara	Pelaksana
20.	Dra. Tanti Sumartini, M.Si.	Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	Pelaksana
21.	Setyanto Priambodo, SE., M.Si.	Kepala Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma	Pelaksana
22.	Drs. Mohammad Djazuli, M.Si.	Inpektorat I	Pelaksana
23.	Djoko Hanggoro, S.T.	Plt. Kepala Biro Pemberitaan Parlemen	Pelaksana
24.	Timbang Supriyanto, S.Sos.	Kepala Bagian Administrasi Barang Milik Negara	Agen Perubahan
25.	Ratna Puspita Sari, S.E., M.Ak.	Kasubag Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Program dan Anggaran	Agen Perubahan
26.	Dian Setiono, S.Sos.	Kasubbag TU Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara	Agen Perubahan
27.	Masyitah Aulia Adhiem, S.Si., M.E.	Peneliti Pertama	Agen Perubahan
28.	Ira Chandra Puspita, S.H., M.H.	Analis Hukum	Agen Perubahan

29.	Heru Nugroho, S.AB., M.AP., QGIA.	Auditor Pertama	Agen Perubahan
30.	Margaretha Susanti, S.E., QGIA.	Auditor Muda	Agen Perubahan
31.	Ade Efendi, S.Sos., M.M.	Kepala Bagian Pengamanan Dalam	Agen Perubahan
32.	Adang Firmansyah, S.P.	Kepala Bagian Pengelolaan RJ Anggota Kalibata	Agen Perubahan
33.	Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin, S.S., M.Si	Kepala Bagian Sekretariat Musyawarah Pimpinan	Agen Perubahan
34.	Renaldi Setiawan, S.I.P.	Kepala Subbagian Tata Usaha Bagian Badan Anggar	Agen Perubahan
35.	Rachmi Suprihartanti Septiningtyas, S.H., M.H.	Kepala Bagian Persidangan Paripurna	Agen Perubahan
36.	Insan Abdirrohman, S.H., M.Si.	Kepala Bagian Alih Bahasa	Agen Perubahan
37.	Anita Handayaniputri, S.T., M.T.	Kepala Bidang Sistem Informasi dan infrastruktur	Agen Perubahan
38.	Nurlatipah Nasir, S.IP., M.A.	Widyaiswara Ahli Pertama Pusdiklat	Agen Perubahan
39.	Ida Nuryati, S.Sos., M.A.	Kepala Bagian Manajemen Kinerja dan informasi ASN	Agen Perubahan
40.	Djoko Hanggoro, S.T.	Kepala Bagian Penerbitan	Pendukung (Agen Perubahan)
41.	Sri Mulyani, S.H.	Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	Agen Perubahan
42.	Sulistiyono, S.Sos., M.Si	Kepala Sub Bagian Acara Pimpinan DPR dan Sekretariat Jenderal	Agen Perubahan
43.	Yanuar Putra Erwin, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama	Agen Perubahan
44.	Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.	Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Muda	Agen Perubahan
45.	Hernadi, S.IP., M.Si.	Kepala Bidang Pelatihan Struktural dan Fungsional	PIC Area Perubahan 1
46.	Edy Susilo, S.H.	Analis Hukum	PIC Area Perubahan 2

47.	Ni'mah Wahyu Purnami, S.E.	Kepala subbagian Organisasi	PIC Area Perubahan 3
48.	Wandita Judith Stephanie A Simangunsong, A.Md. Kom.	Pranata Komputer Pelaksana	PIC Area Perubahan 4
49.	Ida Nuryati, S.Sos., M.A.	Kepala Bagian Manajemen Kinerja dan Informasi ASN	PIC Area Perubahan 5
50.	Sam Karya Nugraha, S.E., M.Ak.	Kepala subbagian pelaporan Keuangan	PIC Area Perubahan 6
51.	Dedy Bagus Prakasa, S.E., M.Ak.	Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran Setjen	
52.	Reti Ardiyanti, SE.	Kepala Subbagian TU Inspektorat Utama	PIC Area Perubahan 7
53.	Wiryawan Narendro Putro, S.Sos.	Kepala Subbagian Pelayanan Informasi Publik	PIC Area Perubahan 8
54.	Fahmi Asy'ari, S.Sos.	Kepala Subbagian Tata Usaha	PIC *Quick Wins*
55.	Rahayu Yuni Susanti, S.T., M.T.I.	Pranata Komputer Muda	PIC *Quick Wins*
56.	Chairil Patria, S.IP., M.Si.	Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan	PIC Zona Integritas
57.	Istijam, S.H.	Analis Pengaduan Masyarakat	PIC Zona Integritas
58.	Slamet Widodo, S.E., M.E.	Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Madya	PIC Zona Integritas
59.	Hikmah, S.Pd., M.Si.	Kepala Subbagian Tata Usaha Pusdiklat	PIC Zona Integritas
60.	Zaqiu Rahman, S.H., M.H.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya	PIC Zona Integritas
61.	Widiharto, S.H., M.H.	Kepala Bagian Sekretariat Badan Legislasi	PIC Zona Integritas
62.	Dwi Widayanti, S.IP.	Kepala Subbagian Rapat	PIC Zona Integritas
63.	Agus Budi Leksono, S.A.P.	Kepala Subbagian Reformasi Birokrasi	Sekretariat
64.	Indrianto, S.H.	Kepala Subbagian Pengelolaan Kinerja dan manajemen Resiko	Sekretariat
65.	Siti Nur Aidah, S.A.P., M.A.P.	Analis Kinerja	Sekretariat

66.	Annissa Putri Nasyi'ah, S.E.	Analis Kinerja	Sekretariat
67.	Harno, S.AP.	Analis Manajemen Resiko	Sekretariat
68.	Inggit Sri Februastuti	Pengelola Akuntabilitas	Sekretariat
69.	Adi Ardiansyah, M.M.	Pengelola Data	Sekretariat
70.	Nur Rochman	Pengadministrasi Umum	Sekretariat

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Reformasi birokrasi pada dasarnya untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan memiliki karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas dari KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Tujuan ini telah tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010–2014. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dirumuskan sasaran reformasi birokrasi, yakni:

a. Birokrasi yang bersih dan akuntabel
b. Birokrasi yang efektif dan efisien
c. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas

Dalam rangka mempercepat pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi, penerapan reformasi birokrasi dilakukan melalui 8 (delapan) area perubahan. Adapun area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan, seperti yang dikemukakan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Hasil yang Diharapkan dari Area Perubahan

Area	Hasil yang diharapkan
Manajemen Perubahan	Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi
Peraturan Perundang-Undangan	Regulasi yang tidak tumpang tindih dan harmonis, serta mendorong pencapaian kinerja pemerintahan
Organisasi	Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*)
Tatalaksana	Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip *good*

	governance
Sistem Manajemen SDM	SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, *capable*, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
Akuntabilitas	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi
Pengawasan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
Pelayanan Publik	Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dan dunia usaha

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI (Setjen DPR RI) merupakan organisasi pendukung bagi kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI, yang berkedudukan sebagai Sekretariat Lembaga sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dinyatakan bahwa Sekretariat Jenderal DPR RI adalah aparatur pemerintah yang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Road Map atau peta jalan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI Tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1124/SEKJEN/2020. Disamping menekankan kepada budaya berbasis kinerja, juga diharapkan *road map* ini dapat mendukung akselerasi pencapaian Visi DPR RI Periode 2020-2024 sebagai Lembaga Perwakilan yang Modern, Berwibawa dan Kredibel. Penyusunan *Road Map* ini dapat dijadikan petunjuk dari mana, kemana perubahan akan dilakukan, dan panduan dalam penyusunan dan evaluasi pelaksanaan program, kebijakan, dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Setjen DPR RI 2020 – 2024.

Dalam menerapkan program reformasi birokrasi, Setjen DPR RI melakukan proses perubahan secara bertahap. Hal ini disebabkan program reformasi birokrasi merupakan program berkelanjutan. Selain itu penerapannya tidak luput dari kekurangan sehingga perlu adanya evaluasi guna melakukan penyempurnaan di tahun selanjutnya.

B. Tujuan dan Sasaran

Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi di Setjen DPR RI. Selain itu dapat menjadi bahan evaluasi program-program reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan untuk menjadi acuan dalam menyusun kebijakan dan strategi di tahun berikutnya, sehingga akan diketahui tingkat keberhasilan dan kekurangan dari target – target dalam program reformasi birokrasi yang sudah dilaksanakan selama tahun 2021.

Adapun sasaran penyusunan laporan ini adalah:

1. Teridentifikasi capaian sasaran dan program pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2021;
2. Teridentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki dan upaya perbaikannya dalam pelaksanaan reformasi birokrasi tahap berikutnya;
3. Teridentifikasinya dokumen pendukung sebagai bukti pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2019.

BAB II
RENCANA KERJA REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2021

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tingkat mikro tertuang dalam *Road Map* Setjen DPR RI Tahun 2020-2024 sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah.

Tabel 2.1
Kegiatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tingkat mikro Setjen DPR RI

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN
1.	**Manajemen Perubahan**	a. Pengembangan dan Penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan *(reform)*; b. Penguatan nilai integritas; c. Pengembangan dan penguatan peran agen perubahan dan *role model;* dan d. Pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industry 4.0.
2.	**Deregulasi Kebijakan**	a. Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi lingkup IP; b. Deregulasi aturan yang menghambat birokrasi; c. Penguatan Sistem Regulasi Nasional di lingkup IP; d. Melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi *agenda setting* dan formulasi kebijakan; e. Melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun.
3.	**Penguatan Kelembagaan**	a. Melakukan *assessment* organisasi berbasis kinerja; b. Restrukturisasi (penyederhanaan) kelembagaan IP berdasarkan hasil penilaian; c. membentuk struktur organisasi yang tepat fungsi.
4.	**Penguatan Tatalaksana**	a. Penyusunan peta proses bisnis; b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP); c. Penerapan Tata Kelola SPBE; d. Penerapan manajemen SPBE; e. Penerapan layanan SPBE; f. Mengintegrasikan pemanfaatan IT dalam tata kelola pemerintahan; g. Implementasi manajemen kearsipan modern dan handal (dari manual ke digital); h. Melakukan pengelolaan arsip sesuai aturan; i. Mengimplementasikan digitalisasi arsip; j. Melakukan pengelolaan keuangan secara tepat dan

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN
		sesuai aturan; k. Melakukan pengelolaan atas aset sesuai dengan kaedah dan aturan yang berlaku; l. Penguatan implementasi keterbukaan infomasi publik; m. Pengembangan proses bisnis instansi dan unit; n. Penyelarasan proses bisnis dan SOP.
5.	**Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur**	a. Penerapan prinsip-prinsip manajemen ASN secara profesional; b. Implementasi manajemen ASN berbasis *merit system;* c. Penetapan ukuran kinerja individu; d. Monitoring dan evaluasi kinerja individu secara berkala; e. Penguatan implementasi *reward and pusnishment*; f. Pengembangan kompetensi dan karir ASN berdasarkan hasil/monitoring dan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi; g. Pemanfaatan IT dalam manjemen ASN; h. Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas ASN; i. Pengembangan implementasi manajemen talenta *(talent pool);* j. Penguatan *database* dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN.
6.	**Penguatan Akuntabilitas**	a. Melakukan perencanaan terintegrasi dan perencanaan yang lintas sektor *(collaborative and crosscutting;* b. Peningkatan kualitas penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi *(goal and strategy cascade);* c. Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja perencanaan dan penganggaran; d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala; e. Penguatan implementasi *value for money* dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja; f. Penguatan sistem evaluasi internal; g. Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggungjawab dalam perencanaan kinerja, monitoring, dan evaluasi.
7.	**Penguatan Pengawasan**	a. Melakukan penguatan implementasi SPIP di seluruh bagian organisasi; b. Melakukan peningkatan peran dan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP); c. Pemenuhan rasio APIP sesuai jumlah ideal aparatur pengawas sehingga dapat mengurangi kemungkinan timbulnya KKN; d. Pelaksanaan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN
		sesuai kaedah dan aturan yang berlaku; e. Pengelolaan barang dan jasa; f. Pembangunan unit kerja Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM); g. Penguatan sistem pengawasan yang akan mendorong tumbuhnya perilaku anti korupsi atau perilaku positif lainnya melalui penguatan pengendalian gratifikasi, penguatan penanganan pengaduan dan komplain, penguatan efektivitas manajemen risiko, dan pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan.
8.	**Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**	a. Melakukan penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik; b. Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik dalam rangka peningkatan akses publik agar memperoleh informasi pelayanan; c. Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu, tuntas, dan berkelanjutan dalam rangka memberikan akses kepada publik untuk mendapatkan pelayanan yang baik; d. Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau, e. Penciptaan pengembangan, dan pelembagaan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik; f. Pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala; g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik secara berkala; h. Meningkatkan tindak lanjut dari laporan hasil survei kepuasan masyarakat.
9.	*Quick Wins* SIMFONI (Sistem Informasi Forum Alat Kelengkapan Dewan dan Mitra Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)	a. Mengembangkan dan memutakhirkan SIMFONI serta mengintegrasikan sistem tersebut dalam mendukung penyelenggaraan rapat dan persidangan; b. Melakukan pengelolaan pengguna, otorisasi akses, serta klasifikasi data dan informasi di dalam aplikasi SIMFONI; c. Menyusun Standar Operasional Prosedur SIMFONI; d. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis penggunaan aplikasi SIMFONI kepada sekretariat Alat Kelengkapan Dewan, Mitra Kerja Dewan dan Unit Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI; e. Melakukan evaluasi penggunaan aplikasi SIMFONI untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan.
	Quick Wins RIA (*Regulatory Impact*	a. Penyusunan Pedoman RIA dan CBA dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN
	Analysis/Pengukuran Kelayakan Suatu Undang-Undang) dan CBA (*Cost And Benefit Analysis*/Analisis Biaya dan Keuntungan) dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang	Undang-Undang; b. Melaksanakan *workshop* terkait penyusunan pedoman RIA dan CBA; c. Melakukan survei untuk mengetahui manfaat RIA dan CBA dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang; d. Melakukan uji petik/konsultasi terkait Pedoman RIA dan CBA dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang; e. Sosialisasi/l*aunching* Pedoman RIA dan CBA dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang; f. Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penyusunan pedoman dan survei.

Rencana aksi/kegiatan Reformasi Birokrasi di Setjen DPR RI tahun 2021 disusun berdasarkan *Road Map* RB Setjen DPR RI 2020 – 2024, dan menindaklanjuti rekomendasi Evaluasi dari Kementerian PAN dan RB. Rencana aksi/kegiatan reformasi birokrasi Setjen DPR RI tahun 2021, untuk masing masing area perubahan adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Rencana Program Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021

NO	AREA PERUBAHAN	PROGRAM KEGIATAN
1.	Manajemen Perubahan	a. Perubahan pola pikir dan budaya kinerja (mental aparatur) pada setiap pegawai melalui pembentukan pola pikir (mind set) dan penerapan budaya organisasi (culture set) yang berorientasi kinerja, efektif, efisien, dan akuntabel yang tertuang dalam budaya unggul yaitu Religius, Akuntabel, Profesional dan Integritas (RAPI). b. Pembentukan dan optimalisasi peran agen perubahan. c. Pelaksanaan reformasi birokrasi secara efektif di tingkat unit.
2.	Deregulasi Kebijakan	a. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang terstandarisasi; b. Menurunnya tumpang tindih dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; c. Efektifitas pengelolaan peraturan perundangundangan di Sekretariat Jenderal DPR RI.

NO	AREA PERUBAHAN	PROGRAM KEGIATAN
3.	Penataan Organisasi	Organisasi Setjen DPR yang tepat ukuran dan fungsi.
4.	Penataan Tatalaksana	a. Pengembangan *e-Government* yang terintegrasi; b. Indeks pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan nilai Sangat Baik. c. Tersusunnya Peta Proses Bisnis; d. Tersusunnya SOP yang selaras dengan Peta Proses Bisnis; dan e. Manajemen Kearsipan berbasis TIK.
5.	Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur	a. Penerapan manajemen Sumber Daya Manusia berdasarkan *merit system*. b. Penempatan pegawai dalam jabatan sesuai dengan persyaratan kompetensinya. c. Terlaksananya kegiatan pengelolaan SDM dengan menggunakan *Talent Pool*. d. Terlaksananya pelatihan yang berorientasi pada pengembangan kompetensi. e. Indeks profesionalitas ASN pada kategori baik
6.	Penguatan Akuntabilitas	Peningkatan penilaian kinerja Setjen DPR mencapai nilai “A” pada tahun 2024.
7.	Penguatan Pengawasan	a. Peningkatan penerapan SPIP di lingkungan Setjen DPR sehingga hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada level 4. b. Peningkatan peran dan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sehingga hasil penilaian tingkat kapabilitas APIP pada level 4.
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	a. Peningkatan kualitas pelayanan publik. b. Penyusunan standar pelayanan di seluruh unit kerja. c. Indeks kepuasan Anggota DPR atas layanan Setjen DPR dengan nilai 82.

BAB III
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2021

A. Capaian Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2021

1. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Setjen DPR RI

Indeks kepuasan Anggota DPR RI diperoleh melalui Survei Kepuasan Pengguna Layanan Setjen DPR RI yang dilakukan terhadap Anggota DPR RI Periode 2019-2024. Survei yang dilakukan berpedoman pada Permenpan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Dengan menggunakan *margin error* sebesar 5% dan *confidence level* 95%, didapat hasil sampel minimal adalah 231 responden yang terdiri dari 9 fraksi di DPR RI dari total populasi sebanyak 575 orang dengan hasil survey sebesar 3,24.

2. Indeks Reformasi Birokrasi

Penilaian atas Indeks Reformasi Birokrasi dilakukan oleh pihak yang berkepentingan, baik itu internal maupun eksternal seperti Kementerian PANRB. Melalui surat dari KemenPANRB Nomor B/82/M.RB.06/2021 tanggal 31 Maret 2021 perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020, nilai evaluasi RB Setjen DPR RI mendapatkan skor 76,63 atau kategori “BB”.

3. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Penilaian atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dilakukan oleh Kementerian PANRB. Berdasarkan Surat Menteri PANRB Nomor B/86/M.AA.05/2021 tanggal 31 Maret 2021 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020, nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Setjen DPR RI sebesar 64,90 atau masuk kategori “B”.

4. Opini BPK atas Laporan Keuangan

Sekretariat Jenderal DPR RI menargetkan raihan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan DPR RI tahun Anggaran 2020. Pada bulan September 2021, pada acara Rakernas Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan, Ketua DPR RI menerima penghargaan atas raihan Opini WTP atas Laporan Keuangan TA 2020 (secara virtual), serta meraih penghargaan berupa WTP Silver atas keberhasilan mempertahankan raihan tersebut selama 10 (sepuluh) tahun berturut turut. Dengan raihan WTP tersebut, maka secara keseluruhan, Sekretariat Jenderal DPR RI berhasil mempertahankan WTP sebanyak 12 (dua belas) kali berturut turut sejak tahun 2009.

5. Hasil Penilaian Maturitas SPIP

Setjen DPR RI, pada tahun 2021 telah melakukan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas oleh APIP Setjen DPR RI terhadap penyelenggaraan SPIP di 4 (empat) eselon I Setjen DPR RI yaitu Deputi Administrasi, Deputi Persidangan, Inspektorat Utama dan Badan Keahlian untuk periode Juli 2020 sampai dengan 30 Juni 2021. Berdasarkan hasil penilaian Mandiri dan hasil penjaminan kualitas, Setjen DPR RI mendapat nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar 3,858 dan nilai indeks penerapan manajemen risiko (MRI) sebesar 3,92, dengan kategori tingkat maturitas **level 3** yaitu "terdefinisi" dengan *range* 3,00 ≤ 3,858 < 4,00 yang artinya organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif.

6. Hasil Penilaian Kapabilitas APIP

Kapabilitas APIP adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari 3 (tiga) unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.

Penilaian kapabilitas APIP di Setjen DPR RI berdasarkan Surat Menteri PAN RB Nomor B/82/M.RB.06/2021 tanggal 31 Maret 2021 berada di level 3.

Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan keahlian, APIP Inspektorat Utama Setjen DPR RI telah mengikuti program pendidikan dan ujian sertifikasi profesi. Beberapa Gelar Sertifikasi Profesi yang telah diperoleh dan dimiliki oleh APIP yakni:

1. 2 (dua) auditor telah memiliki gelar sertifikasi kompetensi *Certified Forensic Auditor* ***(CFrA)***;
2. 3 (tiga) auditor telah memiliki gelar sertifikasi kompetensi *Qualified Internal Auditor* (**QIA**);

3. 1 (satu) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan 14 (empat belas) auditor telah memiliki gelar sertifikasi *kompetensi Qualified Government Internal Auditor* (**QGIA**).
4. 1 (satu) auditor memiliki gelar *Certified Government Accounting Associate* (CGAA)
5. Inspektur Utama memiliki gelar *Certified Government Chief Audit Executive* (CGCAE)
6. 10 (sepuluh) orang APIP mengikuti *Certified Internal Audit Course*
7. 15 (lima belas) orang APIP mengikuti *Certified Risk Management*

7. Jumlah Unit Kerja yang Mendapat Predikat WBK

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil reformasi birokrasi tersebut, Setjen DPR RI perlu membangun *pilot project* pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan pada unit-unit kerja lainnya di lingkungan Setjen DPR RI melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Perencanaan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Setjen DPR RI telah dideklarasikan pada tahun 2021 oleh Sekretaris Jenderal DPR RI. Pelaksanaan pembangunan ZI didasari oleh Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2021 Nomor: 208/SEKJEN/2021 tentang Penetapan Unit Kerja ZI Menuju WBK Atau WBBM di Lingkungan Setjen DPR RI Tahun 2021. Unit kerja yang ditetapkan ZI Menuju WBK tahun 2021 berjumlah 5 (lima) unit kerja yaitu: Biro Persidangan II, Pusat Kajian Anggaran, Pusat Perancangan Undang-Undang, Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat, dan Biro Kesekretariatan Pimpinan. Unit kerja yang ditetapkan ZI Menuju WBBM tahun 2021 berjumlah 2 (dua) unit kerja yaitu: Pusat Pendidikan dan Pelatihan dan Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional.

8. Jumlah Program Diklat dengan Hasil Akreditasi Minimal “B”

Akreditasi Pelatihan merupakan bentuk penilaian kelayakan pelatihan dalam rangka penjaminan mutu untuk menjamin dari segi kualitas, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pelatihan sehingga dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dengan adanya penetapan ini maka Pusdiklat Setjen DPR RI menjadi Lembaga Diklat Akreditasi dan diberikan kepercayaan untuk

melaksanakan supervisi pelaksanaan Pelatihan Struktural, Fungsional dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal DPR RI.

Pusdiklat Setjen DPR RI pada tahun 2021 yakni mendapatkan akreditasi atas 3 (tiga) program pelatihan antara lain:

1) Telah melakukan perpanjangan akreditasi Lembaga penyelenggara Diklat Fungsional Perancangan Peraturan Perundang-undangan, membuat perjanjian kerja sama antara Setjen DPR RI dengan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM selaku Lembaga Pembina bagi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan;
2) Akreditasi Program Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan kategori Akreditasi B; dan
3) Akreditasi Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) dengan kategori Akreditasi B dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun. Hal ini berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 534/K.1/PDP.09/2021 tentang Penetapan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai Lembaga Penyelenggaraan Pelatihan Struktural dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Terakreditasi.

9. Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR

Penilaian terhadap Pengawasan Kearsipan dilakukan oleh Tim Pengawasan Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia. Tahun 2021 hasil penilaian yang diperoleh adalah 73,08 (kategori sangat baik) dengan predikat BB. Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya. Adapun tujuan dari penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan. Selain itu juga meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya. Dalam implementasi kegiatan selama tahun 2021, telah dilakukan sesuai dengan daur hidup arsip.

10. Hasil Penilaian Terhadap Implementasi Standar Teknis Layanan Informasi Publik

Penilaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi publik dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat. Kegiatan tersebut dilakukan untuk menilai apakah PPID badan publik sudah

melaksanakan pelayanan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penilaian dilakukan sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik.

Pada tahun 2021, PPID Setjen DPR RI berhasil mendapatkan predikat sebagai **Badan Publik Informatif** dengan perolehan nilai **96,52** dan berada di urutan ke-2 dalam kategori Lembaga Negara Non Kementerian.

11. **Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)** Setjen DPR RI telah melaksanakan evaluasi SPBE pada tahun 2021 dengan hasil **Baik** pada nilai indeks sebesar 2,84. Adanya perubahan pada tata cara, komponen penilaian, dan penambahan indikator SPBE yang menyesuaikan dengan PermenPANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka Setjen DPR RI masih dapat mempertahankan hasil penilaiannya pada kategori Baik.

    Untuk meningkatkan hasil penilaian SPBE, Setjen DPR RI pada tahun 2021 telah melaksanakan berbagai rekomendasi perbaikan guna menyempurnakan pencapaian hasil nilai SPBE yang lebih baik. Beberapa aspek yang ditingkatkan yaitu aspek kebijakan internal tata kelola, aspek kelembagaan dan aspek layanan publik berbasis elektronik.

    Hasil indeks SPBE Setjen DPR RI Tahun 2021 masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nilai Nasional yang sebesar 2,24 dan rata-rata kategori lainnya seperti LPNK, Kementerian, Lembaga Lain, rata-rata Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Indeks SPBE DPR RI masuk dalam kategori Lembaga Lain (Sekretariat Jenderal Lembaga Negara) memiliki nilai kedua tertinggi dalam kategori ini.

Daftar Penghargaan 2021

1. Piagam Penghargaan atas Keberhasilan Menerapkan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara dengan Predikat "BAIK".
2. Piagam Penghargaan Sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Terbaik II Tahun 2021 Kategori Lembaga Negara.
3. Predikat WBK 2021 dari Kemenpan RB untuk unit kerja Pusat Kajian Anggaran dan Biro Persidangan II.
4. Penghargaan sebagai "JUARA II" Kategori Peningkatan Tata Kelola Berkelanjutan (*Continuous Improvement)*.
5. Penghargaan WTP sebanyak 12 kali berturut-turut.
6. Penghargaan dengan kategori "Memuaskan" sebagai peringkat VII tingkat Lembaga Negara berdasarkan hasil pengawasan kearsipan Tahun 2021.
7. Penghargaan Silver Winner Website PPID Terinovatif.
8. Penghargaan Silver Winner Kategori Goverment PR.
9. Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik memperoleh nilai 96,52 dengan kualifikasi "Informatif".
10. Penghargaan sebagai pemenang pada GSM Award 2021 untuk kategori *Best Collaboration.*
11. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Setjen DPR RI mendapatkan Akreditasi B atas Program Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dan Pelatihan Dasar CPNS.
12. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Setjen DPR RI sebagai lembaga penyelenggara pelatihan yang terakreditasi dengan kategori "Bintang satu" dengan masa berlaku 5 Tahun.
13. Penghargaan sebagai Mitra lembaga pemerintah dengan desain program terbaik di "Program Magang Kampus Merdeka".
14. Perpustakaan DPR RI mendapatkan Akreditasi A dengan nilai tertinggi 95,46 .

Piagam Penghargaan

C. Capaian Reformasi Birokrasi

Dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatnya birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi, maka reformasi birokrasi di lingkungan Setjen DPR pada tahun 2020-2024 berfokus pada delapan area perubahan yang harus dicapai dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI 2020 - 2024.

Tabel 3.1.
Capaian Sasaran Reformasi Birokrasi

No	Sasaran Birokrasi (Hasil)	Area Perubahan (Pengungkit)
1.	Birokrasi yang akuntabel, bersih dan bebas KKN	1. Manajemen Perubahan 2. Penguatan Sistem Pengawasan 3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
2.	Birokrasi yang Efektif dan Efisien	1. Penguatan Kelembagaan 2. Penguatan Tata Laksana 3. Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN 4. Penguatan Peraturan Perundangan
3.	Birokrasi yang memiliki pelayanan berkualitas	1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 2. *Quick Wins*

Untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Setjen DPR RI telah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 992 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Tim Kerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI dan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1365 Tahun 2021 tentang Perubahan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 992 Tahun 2021.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019, maka Kementerian PAN dan RB melakukan evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Setjen DPR RI.

Evaluasi difokuskan pada upaya-upaya yang dilakukan oleh Setjen DPR RI dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Tujuan evaluasi adalah:

a. Untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik.

b. Untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Setjen DPR RI.

Dalam rangka menilai perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Setjen DPR RI tahun 2020, maka telah dilakukan evaluasi oleh Kementerian PAN dan RB. Hasil evaluasi ini telah ditindaklanjuti sebagaimana terlihat pada gambar di bawah.

Gambar 3.1. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi RB

Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa indeks reformasi birokrasi mengalami kenaikan. Perkembangan indeks reformasi birokrasi Setjen DPR RI dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 3.2.
Indeks Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI Tahun 2017-2021

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai						
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
I	**Komponen Pengungkit**								
1.	Penguatan Manajemen Perubahan	5	3,92	4,1	4,11	4,14	4,22		
2.	Penguatan Deregulasi Kebijakan	5	2,29	2,71	3,34	3,44	3,65		
3.	Penguatan Organisasi	6	3,84	2,82	3,84	3,84	4,18		
4.	Penataan Tatalaksana	5	3,6	3,21	3,6	3,38	3,43		
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	15	11,65	13,21	13,23	13,25	13,36		
6.	Penguatan Akuntabilitas	6	3,33	1,88	2,76	2,77	3	Pemenuhan (20)	18,32
7.	Penguatan Pengawasan	12	6,18	5,76	6,81	7,2	8,67	Hasil Antara (10)	5,98
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan	6	2,96	3,36	3,67	4,04	4,26	*Reform* (30)	22,24
	Sub Total Komponen Pengungkit (A)	**60**	**37,77**	**37,05**	**41,36**	**42,06**	**44,77**	**60**	**46,54**
II	**Komponen Hasil**								
1.	Kapasitas dan Akuntabilita	20	12,4	13,08	11,42	12,87	13,19	Akuntabilitas Kinerja dan	7,52

	s Kinerja Organisasi							Keuangan	
2.	Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10	8,07	8,55	9,62	9,23	9,28	Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	9,08
3.	Kualitas Pelayanan Publik	10	7,75	7,55	8,65	8,55	8,58	Kualitas Pelayanan Publik	8,88
								Kinerja Organisasi	4,63
	Sub Total Komponen Hasil (B)	**40**	**28,22**	**29,18**	**29,69**	**30,65**	**31,05**	**40**	**30,10**
	Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)	**100**	**65,99**	**66,23**	**71,05**	**72,71**	**75,82**	**100**	**76,63**
	Kategori		**B**	**B**	**BB**	**BB**	**BB**		**BB**

Indeks reformasi birokrasi Setjen DPR RI ditentukan oleh hasil nilai komponen pengungkit, hasil antara dan komponen *reform*. Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 capaian nilai masing-masing komponen mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pada capaian indeks nilai reformasi birokrasi Setjen DPR RI.

Adapun capaian reformasi birokrasi Setjen DPR RI pada tahun 2021 dari masing-masing area perubahan adalah sebagai berikut:

1 MANAJEMEN PERUBAHAN

Faktor utama penentu keberhasilan progam manajemen perubahan adalah konsistensi komitmen pimpinan organisasi dan pegawai dalam melakukan RB, dan terjadinya perubahan pola pikir dan budaya organisasi (*culture set*) yang berorientasi kinerja, efektif, efisien, dan akuntabel yang tertuang dalam budaya unggul yaitu Religius, Akuntabel, Profesional dan Integritas (RAPI). Untuk mendukung percepatan perubahan pola pikir dan perilaku pegawai melalui pemantapan dan internalisasi nilai budaya unggul RAPI maka telah dibentuk agen perubahan sebagai contoh perubahan di unitnya masing-masing.

Tujuan perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai adalah terwujudnya peningkatan kinerja Setjen DPR RI dalam memberikan dukungan administrasi, persidangan dan keahlian kepada DPR RI secara optimal dan profesional. Upaya-upaya aksi progam manajemen perubahan sebagaimana tertuang di dalam rencana aksi pada Bab III. Adapun capaian dari rencana aksi Area Perubahan 1 (satu) dapat disampaikan sebagaimana Tabel 15 (lima belas) berikut:

Tabel 3.3
Capaian Rencana Aksi Manajemen Perubahan Tahun 2021

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	KETERANGAN
1.	Pengembangan dan Penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan (*reform*);	a. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Internal (RBI) dan RB Eselon I	Keputusan Sekjen tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi	Tim RB Tahun 2021 telah dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Sekjen DPR RI (SK) No. 992/SEKJEN/2021 tentang Pembentukan Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Tim Kerja Pelaksanaan RB Setjen DPR RI Tahun 2021 dan SK Nomor 1365/SEKJEN/2021 tentang perubahan SK No. 992/SEKJEN/2021
		b. Penyusunan *Road Map*	Buku Road Map 2020-2024	Buku Road Map sudah di buat pada tahun 2020
		c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB (Organisasi, Es I dan ZI)	Rapat Reboan	Telah dilaksanakan forum rapat reboan secara berkala dan rapat monitoring dalam rangka monev pelaksanaan RB
2.	Penguatan nilai integritas	a. Sosialisasi budaya organisasi	Laporan Sosialisasi	Webinar internalisasi budaya organisasis Setjen DPR RI kepada CPNS tahun angkatan 2021 dan sosialisasi di media sosial
		b. Pengembangan sistem anti korupsi	Laporan Sosialisasi	Sudah dilaksanakan pada tahun 2020
		c. Peningkatan indeks integritas jabatan	Tim Penyusun, Buku Saku Integritas Pegawai dan Laporan sosialisasi buku saku Integritas Pegawai	Telah tersusun Buku Saku Integritas pada Tahun 2021
		d. Peningkatan indeks integritas organisasi	Laporan Sosialisasi	Sudah dilaksanakan pada tahun 2020
3.	Pengembangan dan penguatan	a. Assessment Agen Perubahan	Laporan Hasil Assessment	Agen Perubahan sudah terpilih atas persetujuan atasan

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	KETERANGAN
	peran agen perubahan dan role model; dan		Agen Perubahan dari Biro SMDA	
		b. Pelatihan Agen Perubahan	Laporan Pelaksanaan Pelatihan oleh Bidang Pelatihan Teknis	Telah dilaksanakan pelatihan pengembangan kapasitas Agen Perubahan pada tanggal 9 Juli 2021
		c. Pertemuan Rutin Dengan Agen Perubahan	Undangan, Daftar Hadir dan Laporan Singkat	Telah dilaksanakan forum rapat selasaan dan reboan secara berkala dan rapat monitoring dalam rangka monev kegiatan Agen Perubahan
		d. Menginventarisasi Rencana Tindak Agen Perubahan	Dokumen rencana tindak Agen Perubahan Setjen DPR RI Tahun 2021	Dokumen renaksi Agen Perubahan dapat di lihat di website RB Setjen DPR RI http://rb.dpr.go.id/setjen/index/id/Agen-Perubahan-BAGIAN-PENGELOLAAN-KINERJA-ORGANISASI-DAN-REFORMASI-BIROKRASI
		e. Monitoring dan Evaluasi Rencana Tindak Agen Perubahan)	Laporan Hasil Monev	Laporan Akhir Rencana Aksi Agen Perubahan sudah disusun oleh masing-masing agen perubahan.
4.	Pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industry 4.0	a. Melaksanakan Sosialisasi Penilaian 360 derajat pada Aspek Perilaku dan Kompetensi Pegawai Setjen DPR RI	Laporan Sosialisasi yang akan dilakukan oleh PUSDIKLAT	Belum dilaksanakan Sosialisasi Penilaian 360 derajat
		b. Melaksanakan sosialisasi pengembangan kompetensi melalui Ujian Pemahaman Teknologi Informasi dan Komunikasi (UPTIK) dan English Proficiency Test for Indonesian Government Officials (EPTIGO)	Laporan Sosialisasi yang akan dilakukan oleh PUSDIKLAT	Telah dilaksanakan pengembangan kompetensi melalui UPTIK dan EPTIGO
		c. Mengevaluasi Pola Pikir dan Budaya Kinerja RAPI (melalui survei	Laporan Hasil Survei melalui Kerjasama PUSDIKLAT dengan	Melalui Kerjasama PUSDIKLAT dengan PUSLIT dan PUSTEKINFO Yang dilaksanakan pada bulan September – Desember 2021

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	KETERANGAN
		pemahaman RAPI)	PUSLIT dan PUSTEKINFO	

Gambar 3.2. (a) Video Agen Perubahan 2021 http://rb.dpr.go.id/setjen/video-detail/id/75 (b) Pelatihan Agen Perubahan (c) *FGD* Agen Perubahan (d) *cover* buku saku integritas

2 DEREGULASI KEBIJAKAN

Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat sebagai penanggungjawab area 2 (Deregulasi Kebijakan) pada Setjen DPR RI mempunyai 5 (lima) program Rencana Aksi. Adapun capaian dari rencana aksi Area Perubahan 2 dapat disampaikan dalam tabel di bawah.

Tabel 3.4
Capaian Rencana Aksi Deregulasi Kebijakan Tahun 2021

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	KETERANGAN
1.	Melakukan dentifikasi dan pemetaan regulasi lingkup IP (menghilangkan *overlapping* peraturan)	a. Melakukan pemetaan keterkaitan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI yang telah ditetapkan dengan	Peta keterkaitan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi dan	Telah selesai disusun Peta Keterkaitan Persekjen yang ditetapkan tahun 2019 dan 2020 dengan Peraturan lainnya

		peraturan-peraturan yang lebih tinggi dan yang sejajar	yang sejajar	
		b. Membuat Pedoman Identifikasi, Analisis, dan Harmonisasi Usulan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI.	Keputusan Sekjen tentang Pembentukan Tim; Naskah Kebijakan; Rancangan Pedoman Identifikasi, Analisis, dan Harmonisasi Usulan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI.	Pedoman identifikasi, analisis, dan harmonisasi dimasukkan menjadi bagian dari draft Persekjen Pembentukan Produk Hukum. Pada tahun 2021 dibentuk tim Identifikasi dan Analisis Usulan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Prioritas Tahun 2022
2.	Deregulasi aturan yang menghambat birokrasi	a. Melakukan Identifikasi, Analisis, dan Harmonisasi Usulan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI untuk Prioritas Tahunan agar tidak terjadi tumpang tindih aturan yang menghambat deregulasi	Naskah Identifikasi, Analisis, dan Harmonisasi Usulan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Prioritas Tahun 2022	Telah diselesaikan identifikasi dan analisis terhadap usulan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI untuk Prioritas Tahun 2022
		b. Evaluasi Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum	Naskah evaluasi atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum	Telah diselesaikan a. Naskah Evaluasi atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum b. Konsep rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum
3.	Penguatan Sistem Regulasi Nasional di	Melakukan pengembangan JDIH	Pengintegrasian JDIH Setjen DPR RI dengan	Telah dilakukan pengintegrasian antara JDIH Setjen DPR RI

	Lingkup IP		JDIH Nasional	dengan JDIH Nasional. Penggunaan aplikasi E-Legalitas untuk pengusulan, pembahasan, dan penetapan Persekjen.
4.	Melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan	Menyusun Program Pembentukan Produk Hukum Sekretariat Jenderal DPR RI Prioritas Tahun 2022	Keputusan Sekjen tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Prioritas Tahun 2022	Telah ditetapkan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Prioritas Tahun 2022 dengan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 145/Sekjen/2022
5.	Melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun	Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pemantauan Kemanfaatan Kebijakan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	Membentuk Tim evaluasi kebijakan.	Telah dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pemantauan Kemanfaatan Kebijakan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 166/Sekjen/2022.

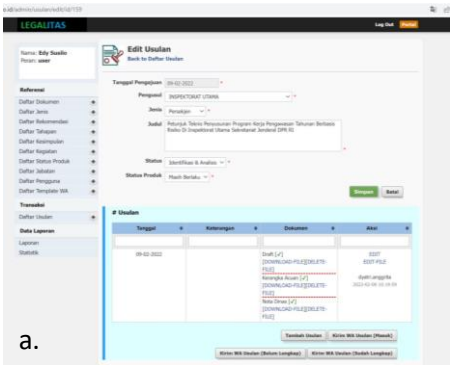

a.

b.

Gambar 3.3. (a) aplikasi e-legalitas (b) aplikasi JDIH

3 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

Untuk mendapatkan hasil terwujudnya kelembagaan pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi, tidak tumpang tindih dan bersinergi antar instansi sehingga mampu mendorong upaya perwujudan tata pemerintahan yang baik, maka pada Area Perubahan Penguatan Organisasi terdapat 3

(tiga) rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Setjen DPR pada tahun 2020 – 2024.

Adapun capaian dari rencana aksi Area Perubahan 3 (tiga) dapat disampaikan sebagaimana Tabel 17 (tujuh belas) berikut:

Tabel 3.5
Capaian Rencana Aksi Penataan dan Penguatan Organisasi Tahun 2021

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	KETERANGAN
1.	*Asessment* organisasi berbasis kinerja	Monitoring dan Evaluasi organisasi sesuai dengan Permenpan RB No 20 Tahun 2018	Laporan hasil monitoring dan evaluasi organisasi	Kegiatan ini tidak dilaksanakan, karena pada tahun 2021 terdapat penetapan struktur organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI yang baru (Persekjen Nomor 6 Tahun 2021). Nilai Evaluasi Kelembagaan pada Tahun 2020 sebesar 74,92 (peringkat komposit 4)
2.	Restrukturisasi (penyederhanaan) kelembagaan IP berdasarkan hasil assessment	Kajian Penyederhanaan Birokrasi	Kajian Penyederhanaan Birokrasi	Hasil pemetaan organisasi jabatan administrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI yang disederhanakan adalah organisasi jabatan administrasi berupa 8 (delapan) eselon IV di lingkungan Biro Sumber Daya Manusia Aparatur, yaitu: a) Subbagian Perencanaan dan Penempatan; b) Subbagian Mutasi, Promosi, dan Kenaikan Pangkat; c) Subbagian Manajemen Kinerja Pegawai; d) Subbagian Kesejahteraan Pegawai dan Sistem Informasi Kepegawaian; e) Subbagian Administrasi Staf Khusus, Tenaga Ahli, dan SAA;

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	KETERANGAN
				f) Subbagian Administrasi Pegawai Non ASN; g) Subbagian Pengelolaan Jabatan Fungsional; dan h) Subbagian Kompetensi Jabatan Fungsional. Hasil pemetaan ini disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/16680/OT.01/12/2021 tanggal 10 Desember 2021
3.	Membentuk struktur organisasi yang tepat fungsi	a. Penyusunan Usulan Penyerderhanaan Birokrasi	Usulan Penyederhanaan Birokrasi	Usulan penyederhanaan birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI disampaikan melalui Nomor B/16680/OT.01/12/2021 tanggal 10 Desember 2021
		b. Revisi Persekjen terkait Organisasi dan Tata Kerja	Persekjen SOTK	Usulan penyederhanaan birokrasi Setjen DPR RI mendapat persetujuan tertulis dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/1228/M.KT.01/2021 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tugas Sub

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	KETERANGAN
				Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Biro Sumber Daya Manusia Aparatur

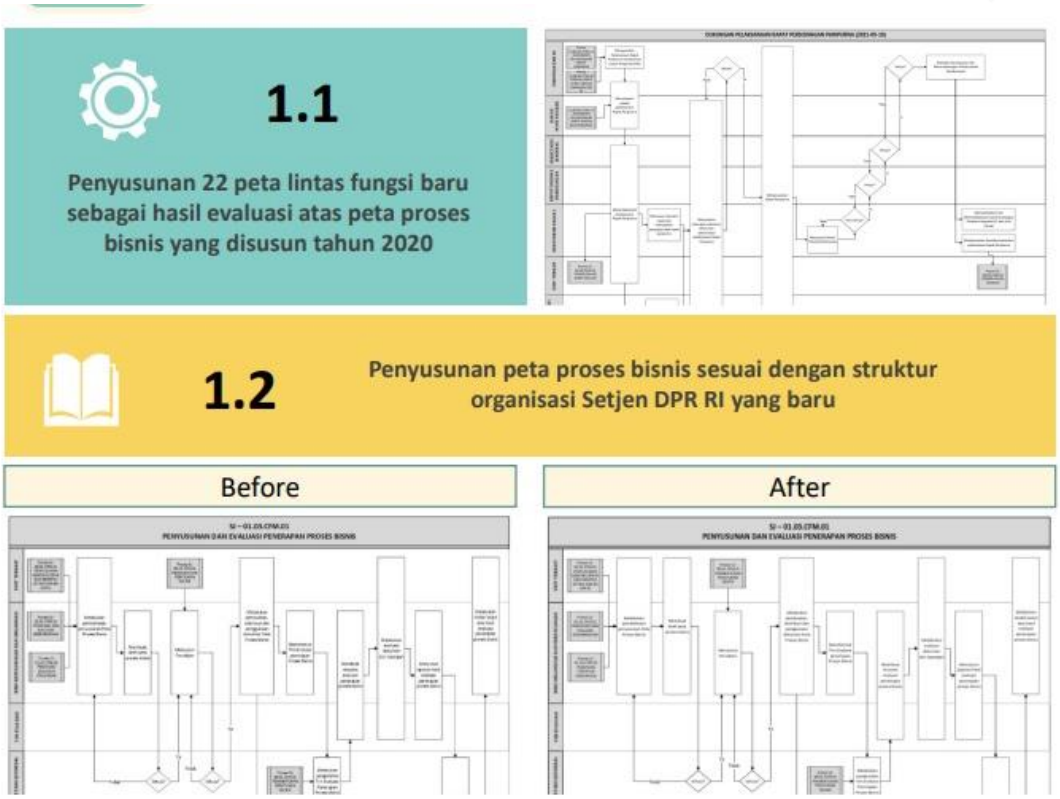

Gambar 3.4. Peta Proses Bisnis

4 PENATAAN TATA LAKSANA

Road Map Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI Tahun 2020-2024, khususnya pada Area Penguatan Tata Laksana yang telah disesuaikan dengan PermenPAN-RB Nomor 25 Tahun 2020 yang meliputi program terkait Penyusunan Peta Proses Bisnis dan SOP, Penerapan SPBE, Integrasi Layanan Teknologi Informasi, Pengelolaan Arsip Digital, Pengelolaan Keuangan, Pengelolaan Aset, dan Penguatan Keterbukaan Informasi Publik.

Adapun capaian dari rencana aksi Area Perubahan 4 (empat) dapat disampaikan sebagaimana berikut.

Tabel 3.6
Capaian Rencana Aksi Penataan Tata Laksana Tahun 2021

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	KETERANGAN
1.	Penyusunan peta proses bisnis	a. Penyempurnaan dan Penyusunan Peta Proses Bisnis	Persekjen tentang Peta Proses Bisnis	Telah disusun Peta Proses Bisnis pada Tahun 2021 sesuai SK Sekjen Nomor 45/SEKJEN/2021
		b. Monitoring dan Evaluasi Peta Proses Bisnis	Laporan Monev	Sedang dalam proses identifikasi ke unit-unit kerja
2.	Penyusunan SOP	a. Penyusunan SOP	Persekjen tentang SOP	Telah dilakukan penyusunan SOP dan ditetapkan dengan SK Sekjen Nomor 21 Tahun 2021
		b. Monitoring dan Evaluasi SOP	Laporan *Monitoring* dan Evaluasi	Telah dilakukan penyusunan SOP dan ditetapkan dengan SK Sekjen Nomor 21 Tahun 2021
3.	Penerapan Tata Kelola SPBE	Penerapan Tata Kelola SPBE	Indeks SPBE	Indeks SPBE Tahun 2021 adalah 2,84. Termasuk dalam kategori “Baik”
4.	Penerapan Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	a. Penyusunan dan pengimplementasian *road map* teknologi informasi dan komunikasi Setjen dan BK DPR RI:		Pencapaian 100%
		- Penyusunan RITIK 2020-2024 Buku 3 (Analisis Masa Depan) dan Buku 4 (*Roadmap* TIK)	- RITIK 2020-2024	Telah disusun RITIK 2020-2024 Buku 3 (Analisis Masa Depan) dan Buku 4:
		- Penetapan RITIK Setjen dan BK DPR RI Tahun 2020-2024;	- SK	Telah ditetapkan RITIK Setjen DPR RI Tahun 2020-2024 seseuai Perseekjen No. 12 Tahun 2020
		- Penyusunan rencana kegiatan prioritas tahunan berdasarkan pada roadmap	Rencana kegiatan prioritas tahunan	Telah disusun rencana kegiatan prioritas tahunan berdasarkan pada roadmap TIK dan Peta Jakan RITIK Tahun 2021 tentang Big Data

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	KETERANGAN
		TIK		
		b. Meningkatkan keamanan informasi		Ditindaklanjuti pada 2021
		- Penyusunan dan penetapan grand design keamanan informasi berdasarkan indeks KAMI	*Grand design* keamanan informasi *Grand design* keamanan informasi	Integrasi dengan data NIK Dukcapil
		- Evaluasi tingkat keamanan informasi dengan indeks KAMI	Indeks KAMI	Sedang dalam tahap pembuatan prolegset untuk Keamanan Informasi
5.	Penerapan Layanan SPBE	a. Pembangunan *Big Data* dan *Command Center:*		Sedang dalam proses kegiatan pelelangan
		1. Penyiapan infrastruktur *Big Data dan Command Center*	Infrastruktur *Big Data* dan *Command Center*	sedang dalam proses kegiatan pelelangan
		b. Monitoring dan evaluasi penggunaan aplikasi:		
		1. Penginputan data aplikasi yang sedang dibangun/ dikembangkan dan dokumen pendukung pada aplikasi SIINDA	Daftar Aplikasi	Sedang dalam proses pelengkapan dokumen
		2. Sosialisasi dan evaluasi terhadap aplikasi yang digunakan	Hasil Sosialisasi dan Evaluasi	Telah dilakukan sosialisasi dan evaluasi terhadap aplikasi yang digunakan
6.	Mengintegrasikan pemanfaatan TI dalam tata kelola pemerintahan	a. Pengembangan sistem *paperless office* dengan penerapan tanda tangan digital	Aplikasi SNIPER	- Pengembangan sistem *paperless office* dengan menggunakan aplikasi SNIPER, telah dilaksanakan dengan menerapkan tanda tangan digital (100%) - Bimtek SNIPER secara virtual telah dilaksanakan pada bulan September 2021

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	KETERANGAN
7.	Implementasi manajemen kearsipan modern dan handal (dari manual ke digital)	Penyusunan kebijakan kearsipan, 4 Pilar: 1. Tata naskah dinas; 2. Sistem Keamanan dan akses arsip; 3. Kode klasifikasi arsip; dan 4. Jadwal retensi arsip.	Pedoman Kearsipan 4 Pilar • Persekjen TND 7 th 2020 • Persekjen TNDE 8 th 2020 • SK Kode KlasifikasiSK JRA Substantif • SK JRA Fasilitatif • Persekjen SKKAAD • Persekjen Alih Media	Telah dilakukan penyusunan kebijakan kearsipan, 4 Pilar yakni Tata naskah dinas, sistem keamanan akses arsip, kode klasifikasi arsip dan jadwal retensi arsip.
8.	Melakukan pengelolaan arsip sesuai aturan	Pengelolaan arsip dinamis (penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip) melalui kegiatan sosialiasi pengawasan kearsipan	Sosialisasi	Sudah terlaksana
9.	Mengimplementasikan digitalisasi arsip	Melakukan pembinaan kearsipan: - Penyusunan jadwal - Pelaksanaan pembinaan - Evaluasi	Arsip Digital	Sudah terlaksana pada tanggal 19 April – 30 April 2021 dan belum melakukan evaluasi.
10.	Melakukan pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai aturan	a. Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Keuangan:		Telah dilakukan pengembangan aplikasi pengelolaan keuangan
		- Perencanaan Aplikasi SINCAN	Aplikasi SINCAN	Belum Terlaksana, akan dilanjutkan pada RB Tahun 2022
		- Implementasi Aplikasi SEMAR	Aplikasi SEMAR	Belum terlaksana, akan dilanjutkan di RB th 2022
		- Aplikasi MANTUL	Aplikasi MANTUL	Pengembangan pada aplikasi Mantul yang awalnya hanya tersedia 3 kolom paket, sekarang sudah terupdate menjadi 6 paket. Monev sudah berjalan

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	KETERANGAN
		- Aplikasi Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas (ABIDIN)	Aplikasi ABIDIN	Aplikasi telah berjalan dan telah dilakukan sosialisasi
		- IKPA Mini	IKPA Mini	Sedang dalam proses pembuatan akses untuk penilaian IKPA Mini
11.	Melakukan pengelolaan atas aset sesuai dengan kaedah dan aturan yang berlaku	Penyusunan konsep pemetaan aset searah dengan peta proses bisnis		
		a. Perencanaan kebutuhan aset:	Perencanaan kebutuhan aset	Perencanaan kebutuhan aset telah dilakukan
		1. Bimtek penggunaan Bagan Akun Standar Belanja Modal dan Persediaan	Laporan Bimtek	Sudah Terlaksana Tahun 2019 Akhir, Evidence sudah ada
		2. Bimtek Penyusunan Rencana Kebutuhan BMN,	Laporan Bimtek	Belum terlaksana di Tahun 2021
		3. SOP tata Cara pengajuan Sewa Menyewa sebagian Gedung/Bangunan dan Tanah di Lingkungan Setjen DPR RI	SOP	Dalam tahap drafting
		4. SOP Penggunaan Sementara sebagian Gedung/Bangunan dan Tanah di Lingkungan Setjen DPR RI)	SOP	Dalam tahap drafting
		b. Pengadaan Aset:		
		1. Pembuatan Ruang Kerja Baru dalam rangka penyesuaian Struktur Organisasi yang baru,	Ruang Kerja	Sudah terlaksana secara bertahap dan masih ada yang belum selesai
		2. Pembuatan dan Pengembangan	Gedung Parkir	Belum dilaksanakan, diusulkan pada rencana

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	KETERANGAN
		Parkir Motor,		anggaran tahun 2022
		3. Pembuatan Kantin Demokrasi,	Gedung Kantin	Belum dilaksanakan, diusulkan pada rencana anggaran tahun 2022
		4. Pengadaan dan Pemasangan Alat Angkut Lanjutan Gedung Nusantara I,	Lift	Sudah dilaksanakan tahun 2020
		5. Pembuatan Gudang Aset	Gudang	Rencana dilaksanakan th 2022
		c. Inventarisasi Aset: 1. Database Aset berdasarkan opname fisik, 2. Penyusunan Juknis	1. DBR hasil aplikasi 2. SOP Penatausahaan	1. Sudah terlaksana, evidence sudah 2. Sudah terlaksana dengan output SOP Penatausahaan
		d. Pelaporan Aset Evaluasi Akhir Tahun	Laporan Evaluasi	Rencana pelaksanaan th 2023
		e. Penggunaan dan Pemeliharaan Aset:		
		1. SOP Perawatan dan Perbaikan Gedung DPR RI	SOP	Belum Terlaksana
		2. SOP Penggunaan Ruang dan Sarana Olahraga	SOP	Belum Terlaksana
		3. SOP Pelayanan Wisma	SOP	Belum Terlaksana
		4. SOP Penggunaan Wisma,	SOP	Belum Terlaksana
		5. SOP Pengelolaan Barang Persediaan pada Bagian Pengelolaan RJA	SOP	Belum Terlaksana
		6. SOP Pemeliharaan Komponen Elektrikal	SOP	Belum Terlaksana
		7. SOP Pemeliharaan dan Perawatan Komponen Mekanikal	SOP	Belum Terlaksana

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	KETERANGAN
		8. SOP Pemeliharaan dan Perawatan Komponen Arsitektur	SOP	Belum Terlaksana
		9. SOP Pemeliharaan/ Perawatan Wisma	SOP	Belum Terlaksana
		10. SOP Penanganan Komplain RJA dan Rumas Dinas Pimpinan	SOP	Drafting
		11. SOP Pengelolaan Uang Sewa	SOP	Belum Terlaksana
		f. Penghapusan dan Pemindah tanganan Aset 1.Usulan Penghapusan, 2.Pelaksanaan Lelang BMN	1. Laporan Penghapusan 2. Risalah Lelang dan SK Penghapusan	Sudah terlaksana, *evidence* sudah ada
12.	Penguatan implementasi keterbukaan informasi publik;	a. Penyusunan SOP Pemutakhiran dan Penatapan Daftar Informasi Publik	SOP	Telah dilakukan penyusunan SOP Pemutakhiran dan Penatapan Daftar Informasi Publik, SOP dengan nomor PT/33-431/SETJEN DPR RI/BP.02/06/ 2021
		b. Penyusunan SOP Penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan	SOP	Sudah ada SOP dengan nomor PT/29-427/SETJEN DPR RI/BP.02/06/ 2021
		c. Penyusunan SOP Pendokumentasia n Informasi Publik	SOP	Sudah ada SOP dengan nomor BP/15-259-SETJEN DAN BK DPR RI/BP.02/05/2018
		d. Melakukan Survey Kepuasan Permohonan Inforamasi Publik	Laporan hasil survey	Telah dilakukan Survei Kepuasan Permohonan Inforamasi Publik, Sudah ada laporan survey, laporan juga tersedia di *website* ppid.dpr.go.id
		e. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan tahunan untuk peningkatan PPID Pelaksana	Laporan hasil monitoring dan Evaluasi	Sudah ada laporan hasil monitoring, laporan juga tersedia di *website* ppid.dpr.go.id
		f. Revitalisasi Website PPID terkait pengajuan keberatan dan	Website yang terintegrasi	Sudah Terlaksana Website sudah terintegrasi dengan website pengmas, delegasi, dan interaksi digital

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	KETERANGAN
		penyelesaiannya		
13.	Pengembangan proses bisnis instansi dan unit;	a. Pembentukan Tim Penyusunan Peta Proses Bisnis yang melibatkan Unit kerja b. Identifikasi dan pengembangan Peta Proses Bisnis Instansi dan Unit Kerja	a. SK Pembentukan Tim b. Laporan Tim	a. Telah dibentuk Tim Penyusunan Peta Proses Bisnis yang melibatkan Unit kerja sesuai Persekjen Nomor 45/SEKJEN/2021 dan Tim telah melakukan pembahasan b. Telah dilaksanakan penyusunan 22 Peta Lintas Fungsi Baru (CFM) berdasarkan hasil evaluasi dan pengembangan dari Unit Kerja
14.	Penyelarasan Proses bisnis dan SOP.	a. Penyelarasan Proses Bisnis dan SOP	Buku Peta Proses Bisnis	Pada penyusunan peta proses bisnis di tahun 2021, terdapat 12 tambahan peta lintas fungsi yang terdiri dari 5 peta lintas fungsi pada saat identifikasi awal dan 7 peta lintas fungsi pada saat proses pembahasan dilaksanakan. Dari 34 peta lintas fungsi yang harus disusun, terdapat 6 peta lintas fungsi yang belum tergambar dikarenakan keterbatasan informasi dan data dukung yang dimiliki untuk menyusun peta lintas fungsi tersebut. Peta Proses Bisnis di tahun 2021 ini diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 23 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dengan komposisi peta proses bisnis yaitu 1 peta proses bisnis, 11 peta sub proses, 1 peta relasi, dan 150 peta lintas fungsi. Dari 150 peta lintas fungsi yang sudah digambarkan, sudah diselaraskan dengan 417 SOP yang sudah dimiliki Sekretariat Jenderal DPR RI
		b. Monitoring dan evaluasi Peta Proses Bisnis dan SOP	Laporan Monitoring dan Evaluasi	Berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi Kemenpan RB tertanggal 5 Januari 2021 masih terdapat

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	KETERANGAN
				50% SOP yang belum disesuaikan dan diseleraskan dengan peta proses bisnis serta laporan monitoring dan evaluasi 417 SOP dan keterkaitannya dengan proses bisnis pada tahun 2021, menyatakan bahwa 109 SOP AP atau 26,14% belum memiliki keterkaitannya dengan proses bisnis. Oleh karenanya, diperlukan penyusunan 22 peta lintas fungsi baru.

a.

b.

Gambar 3.5. (a) Laporan Hasil Evaluasi Indeks SPBE 2021 (b) Sistem *Paperless Office*

5 PENATAAN MANAJEMEN SDM

Road Map Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI Tahun 2020-2024, khususnya pada Area Penataan Manajemen SDM yang telah disesuaikan dengan PermenPAN-RB Nomor 25 Tahun 2020 yang meliputi program terkait menerapkan prinsip-prinsip manajemen ASN secara profesional dengan Implementasi manajemen ASN berbasis *merit system,* Penetapan ukuran kinerja individu, Monitoring dan evaluasi kinerja individu secara berkala, Penguatan implementasi *Reward and Punishment* berdasarkan kinerja, Pengembangan kompetensi dan karir ASN berdasarkan hasil/monitoring dan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi,

Pemanfaatan IT dalam manajemen AS, Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas ASN, Pengembangan implementasi Manajemen Talenta (*Talent pool*), Penguatan database dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN.

Adapun capaian dari rencana aksi Area Perubahan 5 (lima) dapat disampaikan sebagaimana Tabel 19 (sembilan belas) berikut:

Tabel 3.7
Capaian Rencana Aksi Penataan Manajemen SDM Tahun 2021

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	KETERANGAN
1.	Implementasi manajemen ASN berbasis *merit system*	Melaksanakan perencanaan SDM di Lingkungan Setjen DPR RI	Laporan manajemen ASN berbasis merit system	Rekrutmen • Seleksi CPNS dilakukan oleh Tim Pansel CPNSS 2021 dan Tim Verifikasi Administrasi Seleksi Pansel CPNS 2021 sesuai dengan kebutuhan yang disetujui oleh KemenPAN-RB • Pelaksanaan test kemampuan Bahasa Inggris dalam seleksi CPNS Web Base English Profiency Test for Indonesian Government Official (EPTIGO). • Pemberkasan Pindah Instansi Pelaksanaan Posisi JPT Madya/Pratama dilakukan oleh Tim Pansel JPT dan dilaksanakan melalui SEJATI (Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi) yang diumumkan secara terbuka
2.	Penetapan ukuran kinerja individu	Pengembangan SKP berdasarkan PP 30 Tahun 2019	e-kinerja (bentuk penetapan e-kinerja)	• Surat Edaran KemenPAN-RB Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021 • Surat Edaran Sekjen DPR RI Nomor **16153/SE-SEKJEN/2021 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Tahun 2021** • Penilaian kinerja pegawai terbagi atas 2 periode, yaitu: - Bulan Januari – Juni 2021 berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2011

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	KETERANGAN
				tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; - Bulan Juli – Desember 2021 berdasarkan ketentuan PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Kerja Pegawai Negeri Sipil;
3.	Monitoring dan evaluasi kinerja individu secara berkala	Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja individu berdasarkan PP 30 Tahun 2019	Laporan Hasil *Monitoring* dan Evaluasi	• Bimtek Pengisian PK dan SKP tahun 2021 kepada pegawai • Pendampingan pengisian SKP • Penyampaian PK dan SKP sesuai dengan Struktur Organisasi Setjen DPR RI sebagaimana tercantum dalam Persekjen Nomor 6 Tahun 2021
4.	Penguatan implementasi *Reward and Punishment* berdasarkan kinerja	Penyempurnaan mekanisme reward and punishment	Pedoman *reward and punishment* berdasarkan kinerja	• Surat SJ/08355/SETJEN DPR RI/KP.01/06/2021, tanggal 18 Juni 2021, kepada Presiden RI tentang pengajuan satyalancana 30 tahun, 20 tahun dan 10 tahun bagi PNS di lingkungan Setjen DPR RI • Proses pelaksanaan disiplin pegawai oleh Tim Disiplin, serta penguatan pengawasan oleh atasan langsung • Tim Persetujuan Perkawinan/Perceraian
5.	Pengembangan kompetensi dan karir ASN berdasarkan hasil/monitoring dan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi	a. Penyusunan kebutuhan pendidikan dan diklat berbasis kompetensi;	Laporan Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan; Kalender	• Pelaksanaan diklat sesuai kalender diklat
		b. Pelaksanaan pengembangan kompetensi;	Laporan kegiatan pengembangan kompetensi;	• Penugasan diklat kepada pegawai sesuai hasil assessment dan gap kompetensi
		c. Monitoring dan Evaluasi pengembangan	Laporan hasil monitoring dan evaluasi	• Pengadaan workshop dan seminar di lingkungan Setjen

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	KETERANGAN
		kompetensi.	pengembangan kompetensi;	
6.	Pemanfaatan IT dalam manajemen ASN	a.Peningkatan Layanan Pegawai	SE Setjen DPR RI	Surat Edaran Setjen, LIWAT (Layanan Informasi WA Tekini) di Bagian Lingkungan Biro SDMA
		b.Penggunaan Aplikasi E-PPKP BKN	SK Tim	Akan dilanjutkan pada Tahun 2022
		c.Pembangunan e-Jabfung perisalah	Laporan hasil e-jabfung	Melanjutkan proses pembangunan sistem informasi jabatan fungsional perisalah dan asisten perisalah legislatif
7.	Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas ASN	Sosialisasi kode etik ASN	Laporan Sosialisasi	
8.	Pengembangan implementasi Manajemen Talenta (*Talent pool*)	c. Pelaksanaan *assessment*	Laporan Hasil *Assessment*	Prestasi Setjen DPR RI memperoleh penghargaan atas keberhasilan menerapkan sistem merit dengan predikat “BAIK” dari Komisi Aparatur Sipil Negara
		b. Penyusunan pedoman pola karir	Pedoman pola karir	Peraturan Sekjen DPR RI Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pola Karir PNS di Setjen DPR RI
9.	Penguatan database dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN	Pengembangan database kepegawaian berdasarkan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja	Database hasil Analisa Jabatan dan hasil Analisa Beban Kerja.	• Bimtek dengan BKN tentang Open Data SIAP; • Sosialiasi Open Data SIAP untuk updating secara mandiri; • Verifikasi dan Sinkronisasi Updating Data SIAP dengan Data BKN; • Sosialisasi MySAPK BKN; • Updating Pemutakhiran Data Mandiri MySAPK BKN • Pendampingan kepada pegawai dalam pengisian MYSAPK-BKN • Proses Verifikasi dan Aproval data MYSAPK

a.

Sekjen DPR RI Indra Iskandar usai acara Penandatanganan Berita Acara Verifikasi/Evaluasi Penerapan Sistem Merit di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (1/10/2021).

b.

Gambar 3.6. (a) penandatanganan berita acara verifikasi sistem merit (b) penerimaan anugrah meritokrasi

6 PENGUATAN AKUNTABILITAS

Road Map Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI Tahun 2020-2024, khususnya pada Area Penguatan akuntabilitas Manajemen SDM yang telah disesuaikan dengan PermenPAN-RB Nomor 25 Tahun 2020 adalah melakukan perencanaan terintegrasi dan perencanaan yang lintas sektor (*collaborative and crosscutting),* Peningkatkan kualitas penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi *(goal and strategy cascade,* Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala, Penguatan implementasi *value for money* dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja, Penguatan sistem evaluasi internal, Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggungjawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi.

Adapun capaian dari rencana aksi Area Perubahan 6 (enam) dapat disampaikan sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 3.8
Capaian Rencana Aksi Penguatan Akuntabilitas Tahun 2021

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	KETERANGAN
1.	Melakukan perencanaan terintegrasi dan perencanaan yang lintas sector (*collaborative and crosscutting)*	a. Penyusunan Renstra	Renstra (perubahan) 2021-2024	Telah dilakukan penyusunan Renstra dengan struktur organisasi yang baru Persekjen No.18 Tahun 2021
		b. Restrukturisasi anggaran	Usulan penyederhanaan	DIPA Tahun Anggaran 2022

		sesuai dengan struktur organisasi yang baru	struktur anggaran program	
		c. Sosialisasi Penyusunan Anggaran Tahun 2022	Laporan sosialisasi penyusunan dan pelaksanaan anggaran	DIPA Tahun Anggaran 2022
2.	Peningkatkan kualitas penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi *(goal and strategy cascade)*	a. Penyusunan Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Telah dilakukan perbaikan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan struktur organisasi yang baru
		b. Penyusunan Kamus Indikator Kinerja	Kamus Indikator Kinerja Tahun 2021-2024	Telah dilakukan perbaikan Penyusunan Kamus Indikator sesuai dengan struktur organisasi yang baru
		c. Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai level individu	PK Eselon I dan II	Sejalan dengan Renstra, telah disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2021 tingkat Eselon I dan Eselon II
4.	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala	a. Penyusunan pedoman pengumpulan dan pengukuran data kinerja	Kamus Indikator Tahun 2020-2024	Telah dilakukan penyusunan Kamus Indikator Kinerja
		b. Penyusunan data kinerja secara berkala	Aplikasi SiCaput	Pengumpulan data kinerja secara berkala di seluruh unit kerja
		c. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi triwulan atas capaian anggaran dan capaian kinerja	Laporan monitoring dan evaluasi secara berkala	Laporan Realisasi Anggaran Per Triwulan Tahun 2021
5.	Penguatan implementasi *value for money* dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja	Pelaksanaan penelitian atas usulan anggaran unit kerja	Laporan hasil penelitian atas RKA Tahun Anggaran 2022	Telah dilakukan Pelaksanaan penelitian atas usulan anggaran unit kerja
6.	Penguatan sistem evaluasi internal	a. Melakukan reviu laporan kinerja	Reviu laporan kinerja	Laporan Reviu LAK Setjen Tahun 2021

		b. Melakukan evaluasi implementasi SAKIP	Laporan evaluasi implementasi SAKIP	Laporan Evaluasi SAKIP Tahun 2020
7.	Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggungjawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi	Penyelenggaraan Rapat Kerja Penyusunan Anggaran Tahun 2022 dan Rapat Koordinasi kinerja anggaran per triwulan	Laporan pelaksanaan kegiatan rapat dan laporan singkat	Rapat Kerja Penyusunan Anggaran Tahun 2022 dan Rapat Koordinasi kinerja anggaran per triwulan

Gambar 3.7. (a) Penyerahan DIPA T.A. 2022 dan Penandatangan PK dan SKP th 2022 (b) Acara Penghargaan dalam Rapat Kerja Anggaran Setjen DPR RI

7 PENGUATAN PENGAWASAN

Road Map Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI Tahun 2020-2024, khususnya pada Area Penguatan Pengawasan yang telah disesuaikan dengan PermenPAN-RB Nomor 25 Tahun 2020 adalah Melakukan Penguatan implementasi SPIP di seluruh bagian organisasi, Meningkatkan Kompetensi APIP, Pemenuhan Rasio APIP (pemenuhan jumlah ideal aparatur pengawas), Melakukan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaedah dan aturan yang berlaku, Melakukan pengelolaan barang dan jasa sesuai aturan, Pembangunan unit kerja Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM, Penguatan Pengendalian Gratifikasi, Penguatan penanganan pengaduan dan komplain, Penguatan efektivitas manajemen risiko dan Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan.

Adapun capaian dari rencana aksi Area Perubahan 7 (tujuh) dapat disampaikan sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 3.9
Capaian Rencana Aksi Penguatan Pengawasan Tahun 2021

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	KETERANGAN
1.	Melakukan Penguatan implementasi SPIP di seluruh bagian organisasi;	a. Unit kerja melakukan penilaian risiko beserta tindak pengendaliannya	*Risk register* Tahun 2022 dan pengendaliannya sampai dengan tingkat Setjen	Updating risk register tahun 2022 dan pengendaliannya sampai dengan tingkat Setjen.
		b. Monitoring dan evaluasi terhadap SPI	Laporan monev SPI	Tidak dilakukan monev SPI tahun 2021
		c. Unit kerja melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan SPI serta tindaklanjut-nya	a. Laporan monev penerapan SPI b. Laporan monitoring atas tindak lanjut	Tidak dilakukan monev penerapan SPI maupun tindak lanjut pada tahun 2021
		c. Peningkatan maturitas SPIP	Dokumen leveling maturitas SPIP (evaluasi oleh BPKP)	Pelaksanaan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas atas maturitas penyelenggara-an SPIP Terintegrasi tahun 2021 di unit eselon I dan Setjen DPR RI.
2.	Meningkatkan Kompetensi APIP	a. Keikutsertaan auditor dalam diklat penjenjangan dan teknis (secara rutin)	a. Surat pengajuan diklat penjenjangan dan teknis, b. Laporan keikutsertaan diklat (beserta sertifikat) - Inspektur Utama bersertifikasi CGCAE. - Inspektur Utama dan 19 orang auditor bersertifikasi QGIA. - 3 orang auditor bersertifikasi QIA. - 2 orang auditor bersertifika si CFrA.	• Seluruh auditor pada Inspektorat Utama sudah mengikuti Diklat Pembentukan maupun Penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor. • Inspektur Utama telah bersertifikasi CGCAE. • Terdapat 3 (tiga) orang auditor yang memperoleh gelar QIA (Qualified Internal Auditor) dan 19 (sembilan belas) orang yang memperoleh gelar QGIA (Qualified

				Government Internal Auditor) yang disertifikasi oleh DSQIA melalui YPIA. • 2 orang auditor telah bersertifikasi CFrA.
		b. Pelaksanaan Program Pelatihan Mandiri (PPM) secara rutin	a. Jadwal pelaksanaan PPM b. Laporan/ notulen PPM	Telah dilaksanakan kegiatan PPM
		c. Peningkatan kapabilitas APIP	Dokumen l*eveling* kapabilitas APIP (melalui IACM oleh BPKP)	Pelaksanaan penilaian mandiri dan pemenuhan eviden IACM menuju level 4
3.	Pemenuhan Rasio APIP (pemenuhan jumlah ideal aparatur pengawas)	Penambahan jumlah Jabatan Fungsional Auditor (JFA) auditor melalui rekruitmen baru, dan/atau mutasi, dan/atau inpassing	1) Dokumen rekruitmen JFA 2) Dokumen *inpassing* JFA	Sesuai Perka BPKP Nomor: KEP-971/K/SU/2005 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah a. Inspektorat Utama telah mendapatkan tambahan 15 orang calon auditor baru. b. 2 orang auditor telah dipromosikan dari jabatan auditor ahli pertama menjadi auditor ahli muda.
4.	Melakukan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaedah dan aturan yang berlaku;	Pengawasan terhadap pengelolaan dan akuntabilitas keuangan.	1) Laporan tindaklanjut atas hasil rekomendasi pengawasan 2) Opini BPK "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)"	Pengelolaan dan Akuntabilitas Keuangan a. Reviu LK Sms I TA 2021 pada bulan Juli; b. Reviu LK Triwulan III pada bulan Oktober; c. Reviu atas refocussing dan realokasi

				anggaran DPR RI satker dewan; d. Penyelesaian TLHP internal dan eksternal telah dilaksanakan pada semester 1.
5.	Melakukan pengelolaan barang dan jasa sesuai aturan	Pengawasan terhadap pengelolaan barang dan jasa	1) Laporan tindaklanjut atas hasil rekomendasi pengawasan 2) Indeks tata Kelola pengadaan barang dan jasa	Melakukan koordinasi untuk memperoleh nilai pada Indeks Tata Kelola PBJ Setjen DPR RI yang masih "0". a. Biro Umum dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa telah menyusun peta jalan peningkatan kapasitas/ kematangan organisasi UKPBJ Setjen DPR RI. b. Inspektorat Utama melakukan koordinasi dalam pengelolaan Manajemen Risiko di Biro Umum
6.	Pembangunan unit kerja Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM	a. Penetapan dan pembangunan unit kerja ZI	a. SK Penetapan unit kerja ZI, ST Pendampingan Pembangunan unit kerja ZI b. Pembangunan ZI di unit kerja berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor:208/SEKJEN/2021 tentang Penetapan Unit Kerja Zona Integritas Menuju WBK atau WBBM	a. 2 unit kerja telah memperoleh predikat WBK yaitu BKSAP dan Pusdiklat pada tahun 2020, dan pada tahun 2021 terdapat 2 unit kerja yang memperoleh predikat WBK yaitu Biro Persidangan II dan Pusat Kajian Anggaran. b. Inspektorat Utama telah melakukan pendampingan kepada unit

			di Lingkungan Setjen DPR RI Tahun 2021 yaitu: 1) ZI WBK: Biro Persidangan II, Pusat Kajian Anggaran, Pusat Perancangan Undang-Undang, Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat, Biro Kesekretariatan Pimpinan. 2) ZI WBBM: Biro KSAP & Pusdiklat.	kerja yang ditetapkan sebagai unit ZI dalam melakukan pembangunan ZI serta pengisian LKE. c. Inspektorat Utama telah melakukan penilaian internal atas LKE yang diajukan oleh unit ZI. d. Inspektorat Utama telah melakukan pendampingan pada 7 unit ZI dalam tahapan survei responden dan evaluasi oleh Kemenpan RB.
		b. Monitoring dan evaluasi atas zona integritas dan unit kerja ZI	Laporan pendampingan pembangunan ZI di Setjen DPR RI tahun 2021.	Telah disusun laporan pendampingan dan laporan TPI.
7.	Penguatan pengendalian gratifikasi	a. *Public Campaign* secara berkala b. Implementasi penanganan gratifikasi secara berkala Evaluasi atas kebijakan c. Evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi d. Tindak lanjut atas hasil evaluasi penanganan gratifikasi	a. Laporan/ dokumentasi kegiatan/ surat edaran/ himbauan b. Laporan penanganan Gratifikasi c. Laporan evaluasi d. Laporan Tindak Lanjut	a. Setjen DPR RI telah menyebarkan media sosialisasi pesan anti gratifikasi yang disediakan oleh KPK melalui sosial media. b. Pelaporan penanganan gratifikasi secara online melalui GOL (Gratifikasi Online) c. Draft revisi atas Persekjen Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

				d. Draft revisi atas Persekjen Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI akan masuk Prolegset tahun 2022.
8.	Penguatan penanganan pengaduan dan komplain	a. Penyusunan kebijakan tentang pengaduan masyarakat terhadap kinerja Setjen DPR RI dan *Whistle Blowing System* (WBS)	Peraturan Sekjen/Pedoman/ SOP	Persekjen No. 9 Tahun 2020 tentang Pengaduan Masyarakat Terhadap Kinerja Setjen DPR RI.
		b. Sosialisasi kebijakan tentang pengaduan masyarakat terhadap kinerja Setjen DPR RI dan WBS	Laporan/ Dokumentasi kegiatan	Persekjen No. 9 Tahun 2020 tentang Pengaduan Masyarakat Terhadap Kinerja Setjen DPR RI telah dimasukan ke dalam Portal sebagai sarana sosialisasi
		c. Implementasi kebijakan tentang pengaduan masyarakat terhadap kinerja Setjen DPR RI dan Implementasi WBS	1. Laporan/rekap pengadian masyarakat dan tindak lanjutnya 2. Laporan/rekap WBS dan tindak lanjutnya	Laporan WBS tahun 2021 dan sedang dalam tahapan pengembalian atas Tuntutan Ganti Rugi
		d. Monitoring dan evaluasi atas pengaduan masyarakat terhadap kinerja Setjen DPR RI dan WBS	Laporan monitoring dan evaluasi	Belum ada monitoring dan evaluasi atas pengaduan masyarakat terhadap kinerja Setjen DPR RI dan WBS
		e. Tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi pengaduan masyarakat terhadap kinerja Setjen DPR RI WBS	Laporan tindaklanjut	Belum ada tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi
9.	Penguatan efektivitas manajemen risiko	a. Penilaian risiko dan Rencana Tindak Pengendalian atas risiko 1. Melaksanakan bimtek/FGD dari IIA Indonesia terkait	Dokumen *risk register* serta tindak pengendaliannya	Implementasi Persekjen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Sekretariat Jenderal

		Implementasi Manajemen Risiko di Setjen DPR RI 2. Pendampingan dalam Penggunaan Aplikasi SIMANIS.		dan Badan Keahlian DPR RI. a. Menciptakan budaya sadar risiko dengan menandatangani pernyataan komitmen dari pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI dalam melakukan Penerapan Manajemen Risiko. b. Telah tersusunnya Persekjen No.10 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. c. Terbangunnya aplikasi SIMANIS yang membantu Setjen DPR RI dalam mengelola Manajemen Risiko. d. MoU dengan IIA untuk melaksanakan pelatihan terkait Manajemen Risiko pada akhir bulan September. e. *Updating risk register* dari 21 unit eselon II dan akan dilanjutkan dengan penyusunan risk register eselon I dan Setjen DPR RI.
		b. Monitoring dan evaluasi atas penilaian	Laporan monev	Belum ada monitoring dan

		risiko dan tindak pengendaliannya		evaluasi atas penilaian risiko dan tindak pengendaliannya
10.	Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan	a. Sosialisasi kebijakan tentang penanganan benturan kepentingan b. Implementasi penanganan benturan kepentingan c. Monitoring dan evaluasi atas benturan kepentingan d. Tindaklanjut hasil monitoring dan evaluasi atas benturan kepentingan	a. Laporan/ Dokumentasi kegiatan b. Dokumen implementasi penanganan benturan kepentingan c. Laporan monev atas benturan kepentingan d. Laporan tindaklanjut	a. Sosialisasi Persekjen No. 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Benturan Kepentingan di Setjen DPR RI di dalam portal b. – c. Revisi atas peraturan Setjen No. 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan. d. Telah direvisinya Persekjen No. 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan menjadi Persekjen No. 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Benturan Kepentingan.

Gambar 3.8. (a) Sosialisasi dan *launching* Sistem Manajemen Risiko Instansi (SIMANIS) (b) Pendampingan dan verifikasi hasil penilaian mandiri atas penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi Setjen DPR RI

8 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Road Map Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI Tahun 2020-2024, khususnya pada Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang telah disesuaikan dengan PermenPAN-RB Nomor 25 Tahun 2020 adalah Melakukan penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SKM), Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik dalam rangka peningatan akses publik dalam rangka memperoleh informasi pelayanan, Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu, tuntas dan berkelanjutan dalam rangka memberikan akses kepada publik dalam mendapatkan pelayanan yang baik, Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau, Penciptaan, pengembangan, dan pelembagaan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, Pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala atau mendorong K/L untuk melaksanakan survei kepuasan Masyarakat, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik secara berkala, Meningkatkan tindak lanjut dari Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat.

Adapun capaian dari rencana aksi Area Perubahan 8 (delapan) dapat disampaikan sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 3.10
Capaian Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2021

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	KETERANGAN
1.	Melakukan penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SKM)	a. Penyusunan Standar Pelayanan : - Layanan Peliputan Kegiatan DPR RI dan Setjen DPR RI - Layanan Peliputan Media di Gedung DPR RI - Layanan pemberitaan di TV	Standar Pelayanan	Masih dalam proses dan akan dilanjutkan pada Tahun 2022 Pedoman yang digunakan adalah • Persekjen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Setjen DPR RI • Persekjen Nomor 1917/SEKJEN/2020 tentang Klasifikasi Arsip DPR RI • Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sistem

		Parlemen - Layanan Pemberitaan di Radio Parlemen - Layanan Kearsipan		Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis DPR RI • Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Alih Media Arsip • Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 41/SEKJEN/2020 tentang Penetapan Jadwal Retensi Arsip Substantif DPR RI • Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1641/SEKJEN/2020 tentang Penetapan Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif DPR RI
		- Layanan Informasi Publik melalui PPID	Standar Pelayanan	Pencapaian 100% Pemutakhiran SOP pada masa pandemi di tahun 2021
		- Penyusunan payung hukum Siperdana	SK	SK No. 1534/2021 tentang Penetapan Sistem Informasi Persidangan Paripurna
		- Penyusunan SOP Siperdana	SOP	No. PS 38-453/SEKJEN DPR RI/PS.12/11/2021
		- Penyusunan SOP Kunjungan Tamu Edukasi secara virtual masa pandemi	SOP	No. PT/32-430/SEKJEN DPR RI/BP.02/05/2021
		b. Publikasi Maklumat Pelayanan	Maklumat Pelayanan : 1. Maklumat Pelayanan PPID 2. Maklumat Pelayanan Kunjungan Masyarakat (mendorong dilaksanakan tahun 2021) 3. Maklumat Pelayanan terhadap Dewan	1. Sudah dilaksanakan 100% (Maklumat Pelayanan Informasi Publik) 2. Masih dalam proses 100% 3. Maklumat layanan penerjemah dan Maklumat layanan Dewan (Biro Persidangan II) sudah 100%

			(mendorong dilaksanakan tahun 2021 untuk Biro Persidangan 1, 2 dan Biro KSAP	
2.	Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik dalam rangka peningatan akses publik dalam rangka memperoleh informasi pelayanan	Pengintegrasian kanal-kanal pelayanan publik	Kanal pelayanan publik : 1. Kanal Publik yang telah terintegrasi dengan satu akses *website* DPR	Website DPR sudah mewadahi link-link layanan publik yang ada di DPR, tetapi belum terintegrasi dengan content atau inputan dari masyarakat
			2. Kanal Partisipasi Layanan Publik yang terintegrasi melalui website PPID (Silugas, Pengaduan Masyarakat, PUU, Sileg, SIAR dan Perpustakaan)	Sudah dilaksanakan 100%
			3. *Redesign website* layanan publik perpustakaan yang terintegrasi dengan IOS (*Indonesia One Search*) terdiri dari katalog publik berbasis *online*, terbitan, jurnal berbasis *online*	Masih dalam proses dan akan dilanjutkan di tahun 2022 (25%)
			4. Pembangunan kanal Layanan Kunjungan Masyarakat (Tamu Edukasi Publik, Tamu Kunjungan Masyarakat dan Tamu Kunjungan Museum)	Pembuatan website Humas dalam layanan kunjungan masyarakat telah selesai dan akan dikembangkan di tahun 2022 (100%)
3.	Pengelolaan	Pengembangan	a. Pedoman	1. Keputusan BURT

	pengaduan pelayanan publik secara terpadu, tuntas dan berkelanjutan dalam rangka memberikan akses kepada publik dalam mendapatkan pelayanan yang baik	sistem layanan dan pengeloaan pengaduan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diterima	Layanan dan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik	Nomor: 03/BURT/DPR RI/I/2010-2011 2. Buku Panduan Pengaduan Masyarakat (User Setjen, AKD, dan Pimpinan) tahun 2020
			b. SOP Layanan dan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik	SOP sudah ada sejak tahun 2017 (ada 6 SOP : Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat yang ditujukan kepada Pimpinan DPR RI, Penanganan Surat Tembusan Pengaduan Masyarakat kepada Alat Kelengkapan Dewan, Penanganan SMS Pengaduan Masyarakat yang disampaikan kepada Pimpinan DPR RI, Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat yang ditujukan ke Komisi dan Badan, Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui *Website,* Penerimaan Surat Masuk Pengaduan Masyarakat)
			c. SP Layanan dan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik	Aspirasi dan Pengaduan masyarakat yang akan disampaikan telah difasilitasi dalam berbagai bentuk antara lain melalui surat pengaduan tertulis, secara oline ke situs resmi yang dapat dipantau langsung dalam jaringan melalui website http://pengaduan.dpr.go.id dan *Short Message Service* (SMS) ke nomor 08119443344. Sistem *ticketing* telah diberlakukan untuk pengaduan tertulis dan melalui *website* yang dapat dilihat dalam aplikasi SIDUMAS : http://pengaduan.dpr.go.id
4.	Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan	a. PPID melakukan evaluasi dalam peningkatan layanan publik berbasis aplikasi	Laporan hasil evaluasi	Pengembangan Aplikasi PPID akan dilanjutkan pada tahun 2022 (50%)

	yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau	b. BDTI melalukan evaluasi dalam peningkatan layanan publik berbasis aplikasi melalui SPBE	Laporan hasil evaluasi	Pustekinfo telah melakukan audit TIK pada Aplikasi PPID (100%)
		c. Penyelenggaraan pameran virtual arsip dalam rangka diseminasi informasi arsip	Terbentuknya publishing house dan pengelolaan e-jurnal serta e-book.	Bagian Arsip telah menyelnggarakan pameran virtual arsip dalam rangka disemenimasi informasi arsip kepada publik (100%)
		d. Launching aplikasi virtual museum		Lauching dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2021
5.	Penciptaan, pengembangan, dan pelembagaan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik	Inovasi aplikasi pelayanan publik	a. Aplikasi *mobile PPID*	Pengembangan Aplikasi PPID akan dilanjutkan pada tahun 2022 (50%) https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/aaBmiNqXgsiNccR
			b. Aplikasi *mobile* pengaduan masyarakat	Aspirasi dan Pengaduan masyarakat yang akan disampaikan telah difasilitasi dalam berbagai bentuk antara lain melalui surat pengaduan tertulis, secara oline ke situs resmi yang dapat dipantau langsung dalam jaringan melalui website http://pengaduan.dpr.go.id dan Short Message Service (SMS) ke nomor 08119443344 (100%) Sistem *ticketing* telah diberlakukan untuk pengaduan tertulis dan melalui website yang dapat dilihat dalam aplikasi SIDUMAS : http://pengaduan.dpr.go.id
		Sosialisasi dan Pengembangan Aplikasi Mobile Silugas	Laporan Sosialisasi	https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/nXPRMwyJtPWc6yG Sosialisasi Aplikasi Mobile Silugas sudah dilaksanakan PADA BULAN April dan September 2021 (100%)
		Pengembangan e-Media DPR RI	Aplikasi E_Media yg berisikan E-Book, E-Magazine, E-Buletin, E-TV	50%. Masih dalam testing awal (alpha testing) dan akan dilanjutkan pada tahun 2022

			Parlemen, E-Library, E-Journal, E-Museum.	
6.	Pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala atau mendorong K/L untuk melaksanakan survei kepuasan masyarakat	a. Survei kepuasan Layanan Informasi Publik	Laporan hasil survei	Telah dilakukan survei Kepuasan Masyarakat dilakukan terhadap 2 (dua) jenis layanan, yaitu Pelayanan Informasi Publik dan Pelayanan Perpustakaan. https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/ri2eSP6ZBHjWQHW Survey Kepuasan Layanan PPID dalam proses penyusunan rekap dan laporan (75%)
		b. Survei kepuasan Layanan Perpustakaan	Laporan hasil survei	https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/PYwFTjNC5D3TNiM Survey Kepuasan Layanan Perpustakaan SK Sekjen nomor : 1379/sekjen/2021 tanggal 2 september 2021 tentang Pembentukan Tim Survey Perpustakaan DPR RI Tahun 2021 dalam proses penyusunan rekap dan laporan (75%)
		c. Survey kepuasan layanan Siperdana, populasi reponden yang dipilh adalah 245 responden Anggota DPR RI, 101 Pejabat Setjen DPR RI, dan 15 orang responden berasal dari Kementerian/ Lembaga	Laporan hasil survei	Hasil nilai interval konversi IKL sebesar 3,18 dengan kategori mutu pelayanan “Baik” dengan ruang lingkup pertanyaan kemudahan, frekuensi, manfaat dan kepuasan
		d. Rekomendasi terkait hasil survey kepuasan layanan Siperdana	Rekomendasi	a. Biro Persidangan I melaksanakan sosialisasi kepada Anggota DPR RI, Pejabat Setjen DPR RI dan Pejabat Kementerian/Lembaga b. Pustekinfo untuk melaksanakan pengembangan sistem dan teknologi serta mengupayakan

				kestabilan dukungan jaringan dll Menyampaikan kepada Biro Organisasi dan Perencanaan bahwa dengan adanya digitalisasi penyampaian data melalui SIPERDANA ternyata ada efisiensi penggunaan anggaran
7.	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik secara berkala	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik secara berkala	Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi layanan PPID Setjen DPR RI Tahun 2021	https://ppid.dpr.go.id/index/grafik https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/AbQ9L54SiGR8G2J Pada tanggal 26 Oktober 2021 diumumkan hasil monev KIP bahwa PPID DPR RI masuk pada kategori Lembaga Negara Informatif dengan nilai 96,52.
8.	Meningkatkan tindak lanjut dari Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Tindak lanjut laporan hasil survei kepuasan masyarakat	Monitoring dan Evaluasi Layanan PPID Setjen DPR RI 2021	Dalam proses penyusunan rekap dan laporan (75%) https://ppid.dpr.go.id/index/grafik/id/2021

Gambar 3.9. (a) E-Media di Gedung Setjen DPR RI (b) Pemberian Penghargaan Pengelolaan arsip terbaik antar unit pengolah di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI (c) Museum pameran KNIP http://www.museum.dpr.go.id/pameranknip (d) Penghargaan sebagai Badan Publik yang Informatif

D. PROGRAM PERCEPATAN/*QUICK WINS*

Penetapan *Quick Wins* merupakan salah satu upaya pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan oleh kementerian/lembaga dalam mewujudkan prinsip-prinsip *clean goverment* dan *good govermance* secara universal yang diyakini menjadi prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan *quick wins* diharapkan terjadi perbaikan sistem dan mekanisme kerja yang sesuai dengan peran, tugas pokok fungsi dan karakteristik masing-masing kementerian/lembaga, secara khusus di Setjen DPR RI.

Setjen DPR RI turut serta aktif dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi yang dicanangkan pemerintah yang di dalamnya juga terdapat *Quick Wins*. Adapun yang menjadi program *Quick Wins* Setjen DPR RI pada tahun 2021 adalah Sistem Informasi Forum AKD dan Mitra Kerja (SIMFONI) dan *Regulatory Impact Analysis* (RIA).

1. SISTEM INFORMASI FORUM AKD DAN MITRA KERJA (SIMFONI)

Pelaksanaan *Quick Wins* Sistem Informasi Forum AKD dan Mitra Kerja (SIMFONI) merupakan upaya Deputi Bidang Persidangan untuk memperbaiki proses korespondensi, pertukaran data dan informasi antara AKD dengan Mitra Kerja DPR RI. *Quick Wins* SIMFONI ini dapat digunakan sebagai bank data bahan rapat, laporan singkat, laporan kunker, undangan rapat-rapat, jawaban undangan dari Mitra/Pasangan Kerja, serta pengaduan-pengaduan dari masyarakat yang disampaikan melalui AKD serta penyampaian informasi yang berbasiskan teknologi informasi dalam pengelolaan dokumen persidangan mendukung proses

kerja *Work From Home* (*WFH*) sehingga informasi dapat didistribusikan secara cepat dan otomatis.

Rencana Aksi dan capaian *Quick Wins* Sistem Informasi Forum AKD dan Mitra Kerja (SIMFONI) yang akan dilakukan Setjen DPR RI Tahun 2021 sebagaimana Tabel di bawah.

Tabel 3.11
Rencana Aksi dan Capaian *Quick Wins* SIMFONI Tahun 2021

SISTEM INFORMASI FORUM AKD DAN MITRA KERJA (SIMFONI)				
NO	**KEGIATAN**	**SUB KEGIATAN**	**OUTPUT**	**KETERANGAN**
1	Persiapan	Membuat Proposal	Dokumen Proposal	Dilaksanakan 100%
		Membentuk Tim Kerja	SK Tim	Dilaksanakan 100%
2	Pemutakhiran Aplikasi	Pengembangan Fitur	Aplikasi	Pengembangan fitur interaktif Talk dan Annoucement
		Integrasi	Aplikasi	Integrasi direncanakan berlangsung pada Oktober
		Uji coba	Aplikasi	Kegiatan uji coba menggunakan template SOP
3	Penyusunan Kebijakan dan Prosedur Kerja	Membuat Kebijakan dan Prosedur Kerja	SK, SOP, Standar Pelayanan	Dilakukan penyusunan untuk dokumen SK, SOP, dan Standar Pelayanan
4	Penguatan SDM	Sosialisasi SIMFONI	Kegiatan sosialisasi	Sudah dilaksanakan tanggal tertera di Laporan Akhir
		Bimtek SIMFONI	Kegiatan Bimtek	Sudah dilaksanakan tanggal tertera di Laporan Akhir
5	Dokumentasi	Evaluasi Kegiatan	Laporan evaluasi	Evaluasi dengan testimoni dari *user* seperti AKD dan Mitra Kerja
		Penyusunan Laporan	Laporan	Sudah dilaksanakan

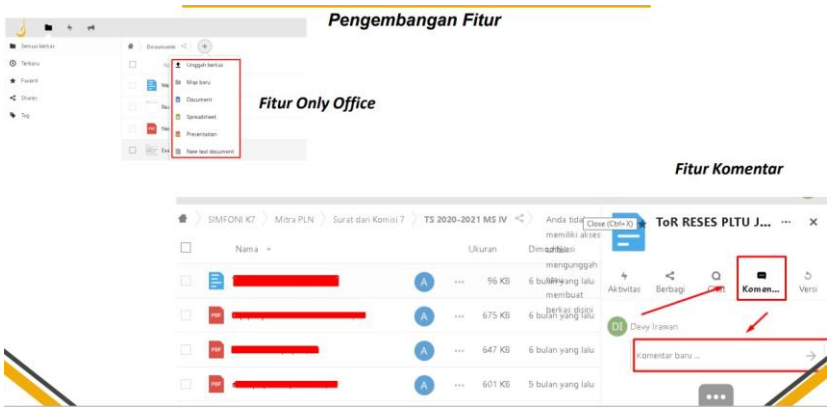

Gambar 3.10. Fitur dalam aplikasi SIMFONI

Gambar 3.11. Pelaksanaan Bimtek ke Mitra AKD

2. *REGULATORY IMPACT ANALYSIS (RIA) DAN COST AND BENEFIT ANALYSIS (CBA)*

Pelaksanaan *Quick Wins* metode *RIA* (*Regulatory Impact Analysis*/Pengukuran Kelayakan Suatu Undang-Undang) merupakan metode untuk mencari rumusan norma/peraturan yang tepat, menganalisis dampak yang ditimbulkan, dan dapat efektif dalam menyelesaikan masalah serta mengantisipasi implikasi.

Sedangkan CBA (*Cost And Benefit Analysis*/Analisis Biaya dan Keuntungan dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Udangan) merupakan bagian dari metode RIA yang digunakan untuk mempertimbangkan sejumlah biaya (*cost)* dan manfaat (*benefit*) terhadap pilihan yang ada, untuk menilai kelayakan proposal kebijakan/RUU, dan mengkonversi dampak secara ekonomi.

Pembentuk UU dituntut untuk menghasilkan UU yang mampu memenuhi berbagai kebutuhan hukum dalam masyarakat. Implikasi Analisis *RIA* dalam Penyusunan NA dan RUU dapat mengidentifikasi berbagai implikasi serta dampak dari norma baru yang tertuang dalam RUU.

Selanjutnya, Rencana Aksi *Quick Wins RIA* (*Regulatory Impact Analysis*/Pengukuran Kelayakan Suatu Undang-Undang) dan *CBA* (*Cost And Benefit Analysis*/Analisis Biaya dan Keuntungan dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang) yang akan dilakukan Setjen DPR RI Tahun 2021 sebagaimana Tabel di bawah.

Tabel 3.12
Rencana Aksi dan Capaian *Quick Wins RIA* dan *CBA* Tahun 2021

RIA* DAN *CBA				
NO	**KEGIATAN**	**SUB KEGIATAN**	**OUTPUT**	**KETERANGAN**
1	Membuat Pedoman Analisis RIA dan CBA	Pembentukan tim kerja dan rapat koordinasi	SK Tim	Dilaksanakan bulan Juni-Juli 2021
		Diskusi Terbatas I	Undangan	Dilaksanakan pada tanggal 23-24 Agustus 2021 dengan mengundang beberapa pakar, yaitu: 1. Ronald Rofiandri (PSHK) 2. Dr. Mailinda Eka Yuniza (UGM) 3. Dr. Maria G.S. Soetopo (UPH) 4. Berly Martawardaya, PhD (INDEF) 5. Dr. Ir. Idqan Fahmi, M.Ec (SB–IPB)
		Workshop I	Konsep awal pedoman RIA dan CBA	Dilaksanakan pada tanggal 30 Agutus sampai dengan 1 September 2021. Kegiatan Workshop I ini dilakukan dengan agenda menyusun Konsep awal Pedoman RIA dan CBA dalam Penyusunan NA dan RUU di Badan Keahlian DPR RI.
		Diskusi Terbatas II	Undangan	DISKUSI TERBATAS II SESI I Dilaksanakan pada tanggal 6 September 2021 dengan mengundang beberapa pakar, yaitu: 1. Franklin De Vrieze (Senior Governance Adviser Westminster Foundation For Democracy) 2. Daniel Trnka (Deputy Head Regulatory Policy Division OECD) 3. Rafael Jiménez Aybar (Environmental Democracy Adviser WFD) 4. Mike Pfister (Senior Economic Adviser and Head of Unit-OECD) **DISKUSI TERBATAS II SESI**

				II Dilaksanakan pada tanggal 17 September 2021 dengan mengundang beberapa pakar, yaitu: 1. Dr. Fotis Fitsilis (Head of Scientific Documentation and Supervision, Hellenic Parliament, Greece) 2. Franklin De Vrieze (Senior Governance Advisor WFD) 3. Demir Mujevic (Secretary of Committee for Economy, Finance, and Budget; Parliament of Montenegro) 4. Andy Beattie (Chief Parliamentary Counsel, Scottish Parliament, UK)
		Workshop II	Pedoman RIA dengan sistematika yg sudah disepakati	Dilaksanakan pada tanggal 16 dan 18 September 2021. Kegiatan Workshop II ini dilakukan dengan agenda penyempurnaan Pedoman RIA dalam Penyusunan NA dan RUU di Badan Keahlian DPR RI.
		Uji Petik	Dokumen	Dilaksanakan pada bulan September 2021
		Survei	Laporan Survei	Dilaksanakan pada bulan Oktober 2021
		Sosialisasi/Launching Pedoman	Laporan sosialisasi	Dilaksanakan pada bulan Oktober 2021
		Monitoring dan evaluasi	Pedoman diskusi terbatas, workshop penyusunan pedoman dan survey	Dilaksanakan pada bulan November 2021
		Praktik Uji Coba Pedoman dan NA dan RUU	Laporan	Dilaksanakan pada bulan Oktober-November 2021
		Penyempurnaan Laporan Final	Laporan Final	Dilaksanakan pada bulan Desember 2021

Gambar 3.12. (a) Pelaksanaan *Quick Wins* metode *RIA* (*Regulatory Impact Analysis* dan CBA (*Cost and Benefit Analysis)*

E. ZONA INTEGRITAS

Berdasarkan Permenpan Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah pengertian Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada Satker yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui Reformasi Birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sedangkan Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi adalah predikat yang diberikan kepada Satker yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan pengawasan dan Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani adalah predikat yang diberikan kepada Satker yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Tingginya tuntutan masyarakat akan terwujudnya birokrasi yang transparan, akuntabilitas, bebas dari korupsi dan Nepotisme (KKN) mengakibatkan reformasi birokrasi merupakan hal yang harus dilakukan oleh instansi Pemerintah. Reformasi birokrasi merupakan langkah awal untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Konsep inilah yang dikembangkan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program Reformasi Birokrasi. Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, mewujudkan birokrasi yang

transparan dan akuntabilitas, maka Setjen DPR RI turut serta aktif dalam pencanangan Zona Integritas dengan menetapkan unit kerja Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional (BKSAP dan OI), Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat), Biro Persidangan II (Rosid II), Pusat Kajian Anggaran (PKA), Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat, Pusat Perancangan Undang-Undang (PUU) dan Biro Kesekretariatan Pimpinan (Ropim) sebagai unit kerja perintisan pelaksanaan Zona Integritas. Dari 7 unit kerja yang diusulkan, baru 4 yang berhasil mendapatkan WBK yakni BKSAP dan OI, Pusdiklat, PKA dan Rosid II.

Berdasarkan hasil pendampingan pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMPZI dan pelaksanaan Survei Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas (SHPRBZI) tahun 2021 di unit kerja Sekretariat Jenderal DPR RI dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pusat Perancangan Undang-Undang

Nilai dari Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Utama terhadap pemenuhan eviden di LKE ZI Pusat Perancangan Undang-Undang menuju WBK adalah 92.35 dengan rincian komponen pengungkit 57.67 dan komponen hasil 34.69. Total populasi responden yang di input oleh Pusat Perancangan Undang-Undang adalah sebanyak 78 responden dengan jumlah sampel 65 responden. Responden yang di input oleh Pusat Perancangan Undang-Undang untuk mengisi survei berjumlah 93 responden.

2. Pusat Kajian Anggaran

Nilai dari Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Utama terhadap pemenuhan eviden di LKE ZI Pusat Kajian Anggaran menuju WBK adalah 95.75 dengan rincian komponen pengungkit 59.29 dan komponen hasil 36.46. Total populasi responden yang di input oleh Pusat Kajian Anggaran adalah sebanyak 100 responden dengan jumlah sampel 80 responden. Responden yang di input oleh Pusat Kajian Anggaran untuk mengisi survei berjumlah 100 responden.

3. Biro Kesekretariatan Pimpinan

Nilai dari Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Utama terhadap pemenuhan eviden di LKE ZI Biro Kesekretariatan Pimpinan menuju

WBK adalah 92.57 dengan rincian komponen pengungkit 56.21 dan komponen hasil 36.36. Total populasi responden yang di input oleh Biro Kesekretariatan Pimpinan adalah sebanyak 120 responden dengan jumlah sampel 92 responden. Responden yang di input oleh Biro Kesekretariatan Pimpinan untuk mengisi survei berjumlah 100 responden.

4. Biro Persidangan II

Nilai dari Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Utama terhadap pemenuhan eviden di LKE ZI Biro Persidangan II menuju WBK adalah 94.81 dengan rincian komponen pengungkit 58 dan komponen hasil 36.81. Total populasi yang di input oleh Biro Persidangan II sebanyak 105 responden dengan jumlah sampel 83 responden. Responden yang di input oleh Biro Persidangan II untuk mengisi survei berjumlah 105 responden.

5. Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat

Nilai dari Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Utama terhadap pemenuhan eviden di LKE ZI Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat menuju WBK adalah 90.90 dengan rincian komponen pengungkit 57.60 dan komponen hasil 33.30. Total populasi yang di input oleh Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat sebanyak 180 responden dengan jumlah sampel 123 responden. Responden yang di input oleh Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat untuk mengisi survei berjumlah 124 responden.

6. Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional

Nilai dari Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Utama terhadap pemenuhan eviden di LKE ZI Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional menuju WBBM adalah 93.70 dengan rincian komponen pengungkit 57.14 dan komponen hasil 36.56. Total populasi yang di input oleh Biro Kerja Sama Antar Parlemen sebanyak 150 responden dengan jumlah sampel 108 responden. Responden yang di input oleh Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional untuk mengisi survei berjumlah 113 responden.

7. Pusat Pendidikan dan Pelatihan.

Nilai dari Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Utama terhadap pemenuhan eviden di LKE ZI Pusat Pendidikan dan Pelatihan menuju WBBM adalah 93.50 dengan rincian komponen pengungkit 59 dan komponen hasil 34.50. Total populasi yang di input oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan sebanyak 781 responden dengan jumlah sampel 258 responden. Responden yang di input oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan untuk mengisi survei berjumlah 314 responden.

Realisasi jumlah unit kerja sampai dengan tahun 2021 adalah 4 unit kerja, dengan persentase capaian sebesar 100% atau 4 (empat) unit kerja yang mendapat predikat WBK yaitu Biro Persidangan II dan Pusat Kajian Anggaran pada Tahun 2021 serta Pusat Pendidikan dan Pelatihan dan Biro Kerjasama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional pada Tahun 2020. Berdasarkan hasil nilai PMPZI Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Biro Kerjasama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional, Biro Persidangan II dan Pusat Kajian Anggaran diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 3.13
Capaian Nilai Pembangunan Zona Integritas Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021

Area/Indikator/Pernyataan	Minimal	2021
Total Pengungkit	48	59
Total Hasil	-	34.50
Nilai Pembangunan ZI		**93.50**

Tabel 3.14
Capaian Nilai Pembangunan Zona Integritas Biro Kerjasama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional ahun 2021

Area/Indikator/Pernyataan	Minimal	2021
Total Pengungkit	48	57,14
Total Hasil	-	36,56
Nilai Pembangunan ZI		**93,70**

Tabel 3.15
Capaian Nilai Pembangunan Zona Integritas Biro Persidangan II Tahun 2021

Area/Indikator/Pernyataan	Minimal	2021
Total Pengungkit	40	58
Total Hasil	-	36,81
Nilai Pembangunan ZI		**94,81**

Tabel 3.16
Capaian Nilai Pembangunan Zona Integritas Pusat Kajian Anggaran Tahun 2021

Area/Indikator/Pernyataan	Minimal	2021
Total Pengungkit	40	59,29
Total Hasil	-	36,46
Nilai Pembangunan ZI		**95,75**

Gambar 3.13. Pengumuman peraihan predikat WBK 2021 dari KemenPANRB

Gambar 3.14. (a) Penyerahan piagam penghargaan ZI atas WBK tahun 2021 Biro Persidangan II (b) Penyerahan piagam penghargaan ZI atas WBK tahun 2021

F. Permasalahan dan Tindak Lanjut

Reformasi Birokrasi pada hakekatnya adalah sebuah komitmen serta perubahan terhadap sikap dan mental menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Setjen DPR RI masih belum sepenuhnya berjalan dengan optimal, perubahan terhadap *mind set* dan kultur budaya aparatur belum menyeluruh dilaksanakan.

Terhadap permasalahan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan melakukan komunikasi dan sosialisasi yang lebih intensif yang melibatkan seluruh pejabat dan pegawai terutama kepada pegawai-pegawai yang masih baru di berbagai tingkatan secara aktif dalam diskusi-diskusi pelaksanaan RB, seperti mengikutsertakan pejabat dan pegawai dalam seminar/diklat/ workshop terkait pelaksanaan RB di lingkungan Setjen DPR RI.

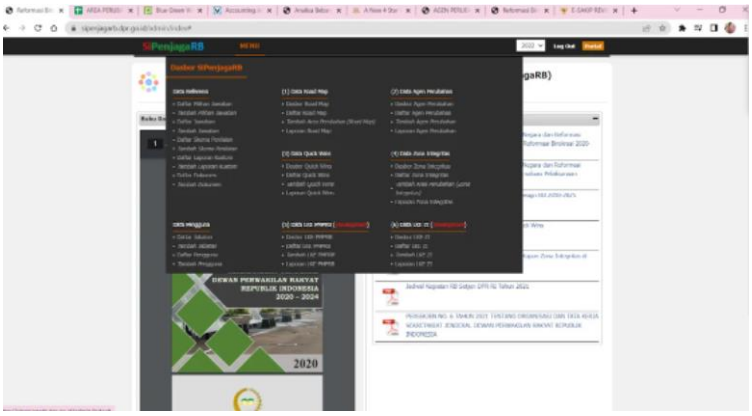

Gambar 3.15. Aplikasi SiPenjagaRB

BAB IV
PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI Tahun 2021 merupakan gambaran secara keseluruhan dari pelaksanaan kegiatan RB dan *Quick Win* di Lingkungan Setjen DPR RI. Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi atas apa yang sudah dilaksanakan dalam konteks reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, efisien dan dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Laporan ini juga memberikan informasi bagi pelaksana reformasi birokrasi untuk memperhatikan dan mencermati rencana-rencana kegiatan reformasi birokrasi yang telah disepakati dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Setjen DPR RI pada tahun 2021 merupakan penyempurnaan dan penguatan dari pelaksanaan reformasi birokrasi sebelumnya. Secara keseluruhan, penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Setjen DPR RI pada Tahun 2021 sudah berjalan baik. Hal tersebut terlihat dari capaian-capaian yang dihasilkan dan adanya semangat pegawai Setjen DPR RI yang terus melaksanakan reformasi birokrasi. Salah satunya adalah dengan terus menerus memperbaiki kualitas pelayanan publik.

Melalui optimalisasi 8 (delapan) area perubahan program reformasi birokrasi dan *Quick Wins* diharapkan pelaksanaan reformasi birokrasi Setjen DPR RI semakin mendapat kemajuan seiring perbaikan di berbagai lini area perubahan. Untuk itu dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan di setiap area perubahan, Setjen DPR RI menindaklanjuti saran perbaikan baik yang terdapat dalam hasil survei internal, maupun saran yang disampaikan oleh Tim Evaluator Kementerian PANRB. Selain itu, seluruh jajaran pimpinan dan pegawai di lingkungan Setjen DPR RI perlu memiliki komitmen yang sama dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.